



**KONFLIK POLITIK SUTAN SJAHRIR-TAN MALAKA
TAHUN 1945-1947**

SKRIPSI

Oleh

Rofi Setiawan
NIM 140210302022

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER**

2019



**KONFLIK POLITIK SUTAN SJAHRIR-TAN MALAKA
TAHUN 1945-1947**

SKRIPSI

diajukan sebagai tugas akhir untuk memenuhi salah satu syarat
menyelesaikan Program Strata Satu (S1) Program Studi
Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan
Ilmu Pengetahuan Sosial FKIP
Universitas Jember

Oleh
Rofi Setiawan
NIM 140210302022

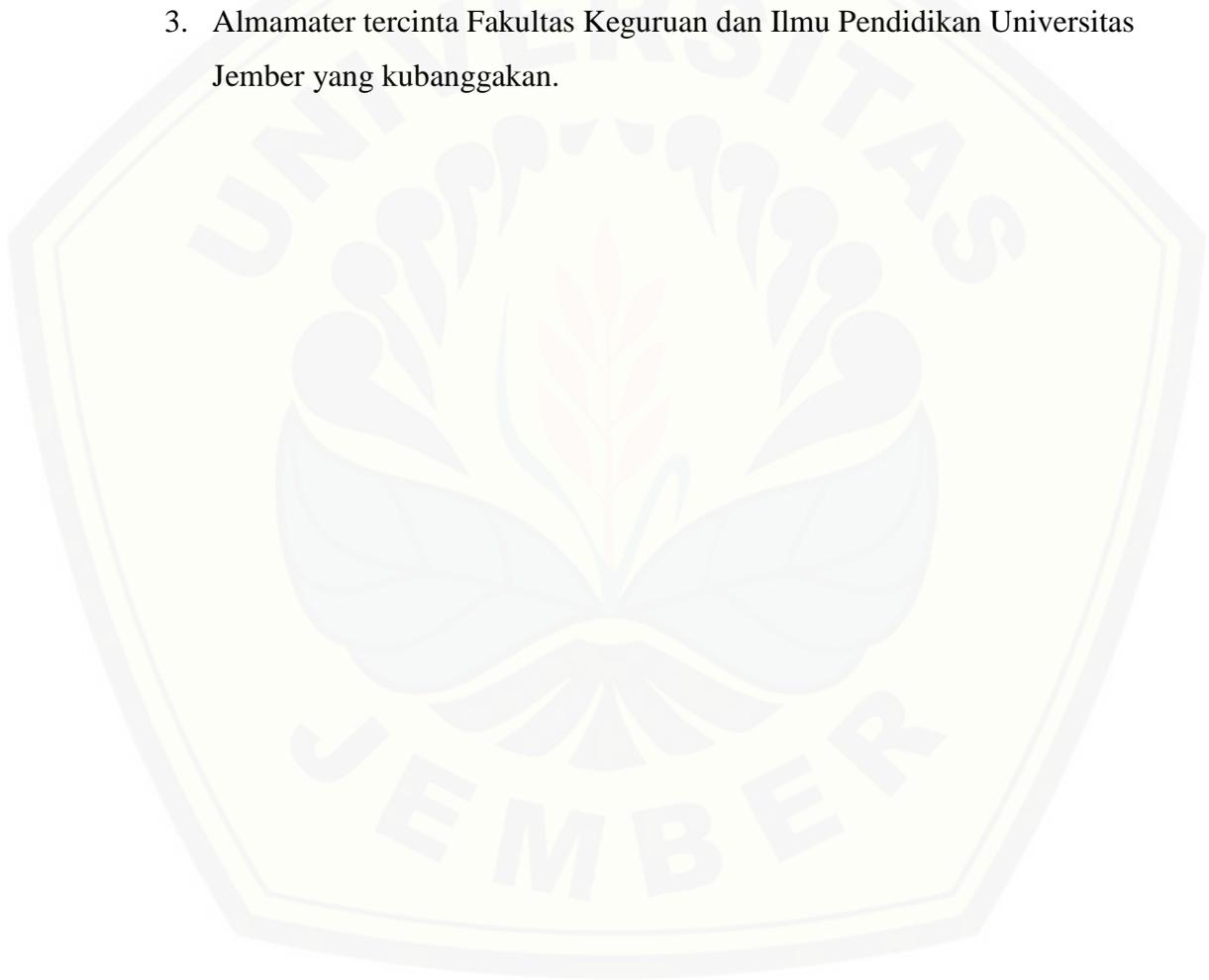
**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER**

2019

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

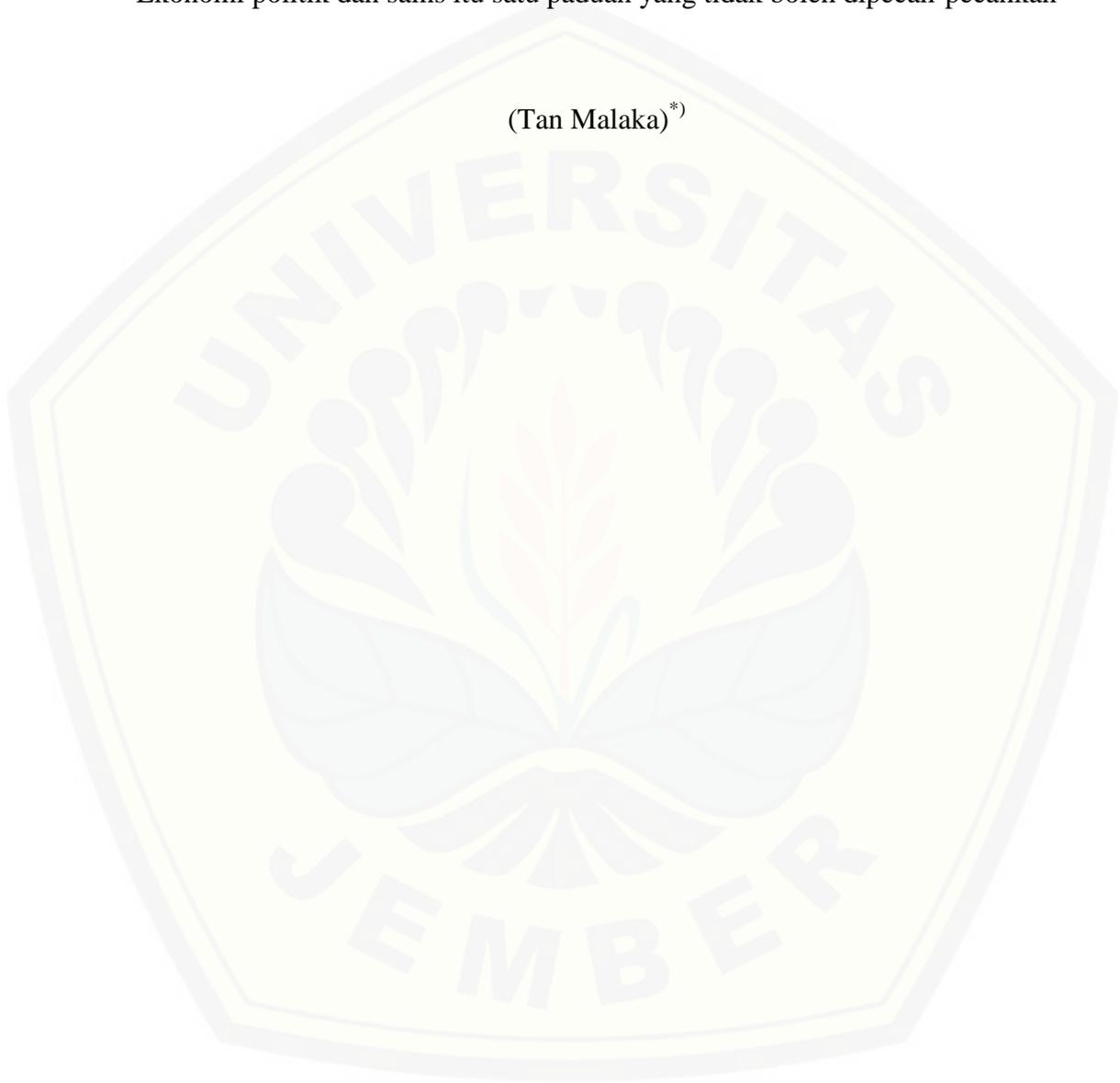
1. Ibu Hanifa dan Bapak Rasidi serta Adikku Rohmatus Syaidah juga semua keluargaku yang telah memberikan do'a di setiap langkahku juga kasih sayang yang tulus untuk keselamatan, kelancaran dan kesuksesanku.
2. Guru-guruku mulai dari SD hingga SMA serta dosen-dosenku Perguruan Tinggi, terima kasih atas semua ilmu yang telah diberikan kepadaku.
3. Almamater tercinta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember yang kubanggakan.



MOTTO

“Ekonomi politik dan sains itu satu paduan yang tidak boleh dipecah-pecahkan”

(Tan Malaka)^{*)}



^{*)} Tan Malaka. 1951. MADILOG Materialisme, Dialektika dan Logika. Jakarta. Widjaya.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rofi Setiawan

NIM : 140210302022

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul “Konflik Politik Sutan Sjahrir – Tan Malaka Tahun 1945-1947” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengna sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 3 Juli 2019

Yang menyatakan,

Rofi Setiawan

NIM. 140210302022

SKRIPSI

**KONFLIK POLITIK SUTAN SJAHRIR – TAN MALAKA
TAHUN 1945-1947**

Oleh:

Rofi Setiawan

NIM 140210302022

Pembimbing:

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Kayan Swastika, M.Si.

Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Sugiyanto, M.Hum.

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Konflik Politik Sutan Sjahrir – Tan Malaka Tahun 1945-1947” ini telah diuji dan disahkan oleh Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember pada :

hari, tanggal :

tempat : Gedung 1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember

Tim Penguji

Ketua,

Sekretaris,

Drs. Kayan Swastika, M.Si.
NIP. 196005181989021001

Drs. Sugiyanto, M.Hum.
NIP. 195702201985031003

Anggota I,

Anggota II,

Drs. Sumarjono, M.Si.
NIP. 195808231987021001

Drs. Marjono, M.Hum.
NIP. 196004221988021001

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Prof. Drs. Dafik, M.Sc., Ph.D
NIP. 196808021993031004

RINGKASAN

Konflik Politik Sutan Sjahrir – Tan Malaka Tahun 1945-1947; Rofi Setiawan, 140210302022; 2019: xv+69 halaman; Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

Latar belakang pemilihan masalah adalah berawal pada rencana penyerahan pemimpin besar revolusi Indonesia yang dipimpin oleh Sukarno akan diberikan kepada Tan Malaka jikalau terjadi sesuatu kepada Sukarno juga Hatta atas kondisi darurat Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan. Akan tetapi Hatta juga memasukkan nama Sutan Sjahrir pada surat wasiat Sukarno karena dirasa kedua tokoh tersebut patut diperhitungkan perjuangannya. Maka dari itu perpecahan politik kedua tokoh ini berlanjut saat perbedaan strategi perjuangan untuk menghadapi kedatangan kembali penjajah. Tan Malaka dengan gerakan revolusionernya serta strategi diplomasi Sutan Sjahrir.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Latar belakang terjadinya konflik antara Sutan Sjahrir dan Tan Malaka Tahun 1945-1947; (2) Situasi politik Pemerintahan Sjahrir dalam menghadapi Tan Malaka sebagai barisan oposisi Tahun 1945-1947; (3) Dampak konflik politik antara Sutan Sjahrir dan Tan Malaka terhadap kondisi Pemerintahan Indonesia. Tujuan yang ingin dicapai penulis adalah: (1) Untuk mengkaji dan menganalisis latar belakang konflik antara Sutan Sjahrir dan Tan Malaka Tahun 1945-1947; (2) Untuk mengkaji dan menganalisis situasi politik Pemerintahan Sjahrir menghadapi Tan Malaka sebagai barisan oposisi pada Tahun 1945-1947; (3) Untuk mengkaji dan menganalisis dampak konflik politik antara Sutan Sjahrir dan Tan Malaka terhadap Pemerintahan Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian sejarah, maka metode yang digunakan adalah metode sejarah. Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisa fakta-fakta sejarah untuk dapat menceritakan kembali peristiwa sejarah. Adapun langkah-langkah dalam metode sejarah ini yaitu : (1) heuristik, langkah ini peneliti berusaha mengumpulkan sumber-sumber yang berhubungan dengan konflik politik Sutan Sjahrir dan Tan Malaka baik berupa buku maupun dokumen; (2) kritik merupakan untuk menguji keaslian serta

isi dari sumber dan dokumen yang didapat; (3) interpretasi adalah penulis melakukan penafsiran awal dari fakta yang didapatkan; dan (4) historiografi yaitu penulis melakukan penulisan sejarah secara kronologis, logis dan sistematis sesuai fakta yang ada. Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: (1) Bagi penulis dijadikan sarana latihan dalam usaha mengadakan penelitian untuk menyelesaikan tugas akhir S1; (2) Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai perbedaan ideologi, strategi politik serta dampak dari konflik kedua tokoh ini; (3) Bagi Almamater FKIP Universitas Jember, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan sebagai wujud nyata dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Indonesia telah dinyatakan merdeka pada 17 Agustus 1945 tetap saja masih ada penentangan baik internal ataupun eksternal. perbedaan pandangan atau sikap secara politik yang menjadi dasar konflik internal pada negara yang baru merdeka ini. Konsep-konsep dalam mempertahankan serta perjuangan untuk membentuk awal konstitusi Indonesia ini masih ada beberapa tokoh yang berkonflik, sama halnya seperti saat akan diproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi pada masa ini yang lebih mencolok akan konflik internal ini adalah para tokoh elit politik baik pemerintah maupun pihak berpengaruh atau pihak oposisi. Konflik yang sangat mencolok adalah masa pemerintahan kabinet Sjahrir dengan Persatuan Perjuangan yang dipimpin oleh Tan Malaka, mengenai susunan kabinet maupun program pemerintah untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Penulisan Skripsi ini menggunakan pendekatan sosiologi politik dan teori konflik Duverger. Kemudian konflik kedua tokoh ini dilatarbelakangi oleh dua faktor pendorong yaitu: (1) Faktor ideologi; (2) Surat Wasiat Sukarno-Hatta. Ideologi Sjahrir dan Tan Malaka sangat berbeda pandangan akan tetapi tujuannya untuk kemerdekaan Indonesia seutuhnya, hingga Sukarno-Hatta membuat surat wasiat yang dituliskan kedua nama tokoh pemuda ini. Mengenai surat wasiat tersebut membuat Sjahrir dan Tan Malaka sama-sama diharapkan untuk menjadi pemimpin revolusi, tetapi Sjahrir lebih beruntung karena dipilih oleh Sukarno-Hatta untuk memimpin suatu kabinet dalam

melancarkan hubungan diplomasi dengan Belanda. Sjahrir yang memang berpengalaman sekolah di Belanda juga kedekatannya terhadap beberapa tokoh Belanda tersebut. Sjahrir yang memiliki kekuasaan memimpin kabinet melakukan tindakan sesuai kehendaknya, seperti halnya pemilihan anggota kabinet juga program kabinet yang tidak disetujui oleh beberapa elit politik yaitu berunding dengan penjajah atau Belanda. Hal itu membuat Tan Malaka dan para elit politik berkumpul untuk menyatukan gagasan menjadi pihak oposisi yang kemudian disepakati bersama bernama Persatuan Perjuangan (PP). Pemerintahan kabinet Sjahrir dengan adanya pihak oposisi yang progresif dimana salah satu pemimpinnya Tan Malaka membuat jatuh bangunnya kepemimpinan Sjahrir dalam kabinet, hingga terjadinya beberapa peristiwa seperti penculikan Sutan Sjahrir, penangkapan beberapa elit politik pemimpin PP termasuk Tan Malaka serta peristiwa “3 Juli” atau kudeta terhadap pemerintah yang dianggap dilakukan oleh Tan Malaka. Konflik yang terjadi tersebut tidak hanya menjadikan suatu konflik yang berkepanjangan dalam masa awal pemerintahan Indonesia, tetapi pada akhirnya menciptakan persatuan untuk pemerintahan yang lebih baik hingga kemerdekaan Indonesia diakui sepenuhnya oleh bangsa barat.

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Alhamdulillah berkat rahmat ridho dan hidayahnya penulis di beri kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “Konflik Politik Sutan Sjahrir – Tan Malaka Tahun 1945-1947”. Sholawat serta salam semoga selalu di limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis sampaikan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak yang telah berjasa baik langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Drs. Moh Hasan. M.Sc.,Ph.D selaku Rektor Universitas Jember;
2. Prof. Drs. Dafik., M.Sc., Ph.D selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember;
3. Dr. Nurul Umamah, M.Pd selaku Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Jember;
4. Dr. Sumardi, M.Hum selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Drs. Marjono, M.Hum Dosen Pembimbing Akademik;
5. Drs. Kayan Swastika, M.Si dan Drs. Sugiyanto, M.Hum selaku dosen pembimbing satu dan dua. Yang telah memberikan bimbingan hingga skripsi ini selesai;
6. Drs. Sumarjono M.Si dan Drs. Marjono, M.Hum selaku penguji 1 dan 2 yang telah memberikan masukan yang berguna demi kepentingan penyempurnaan skripsi ini;
7. Bapak dan Ibu Dosen Pendidikan Sejarah yang telah memberikan bekal ilmu yang manfaat kepada penulis;
8. Kedua orang tuaku bapak Rasidi, ibu Hanifa, dan adikku Rohmatus Syaidah, yang tak pernah lelah memberikan dukungan, do'a, materi dan moril demi tercapainya kesuksesan penulis;
9. Kawan-kawan GMNI FKIP UNEJ, khususnya (Mas Hasan, Mas Doni, Mas Dayat, Mas Aries, Mas Robit, dan Alm. Mas Ridho) juga kawan-

kawan lainnya dimana telah membantu memberikan dukungan, semangat dan pembelajaran selama penyelesaian skripsi ini;

10. Kawan-Kawan pengurus GMNI FKIP UNEJ (Nandra, Diva, Ferman, Natali, Agustin, dan Tyo) serta Kawan-kawan seangkatan di GMNI (Mubin dan Budi) yang telah memberikan semangat serta bantuan untuk terselesainya skripsi ini;
11. Terima kasih kepada kawan-kawan seangkatan Pendidikan Sejarah 2014 yang tidak dapat disebutkan satu-persatu dimana selalu memotivasi untuk segera menyelesaikan penulisan skripsi;
12. Teman-teman Kosan Blok G khususnya (Ajud, Lukman dan Somad) juga teman seperjuangan dari kota Situbondo tercinta terima kasih atas motivasi dan selalu memberi semangat untuk penulis;
13. Semua pihak yang membantu terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

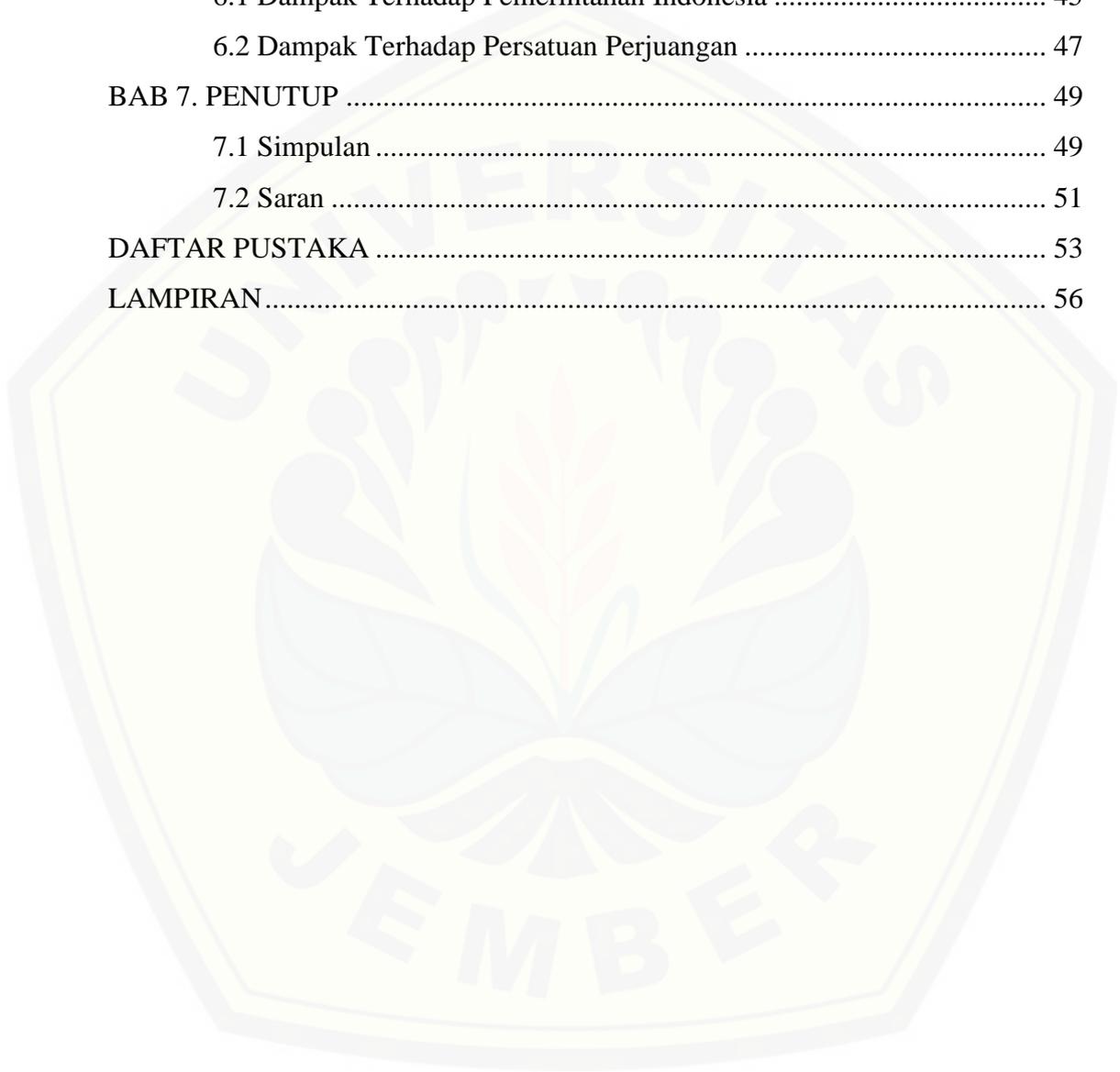
Jember, 3 Juli 2019

Penulis

DAFTAR ISI

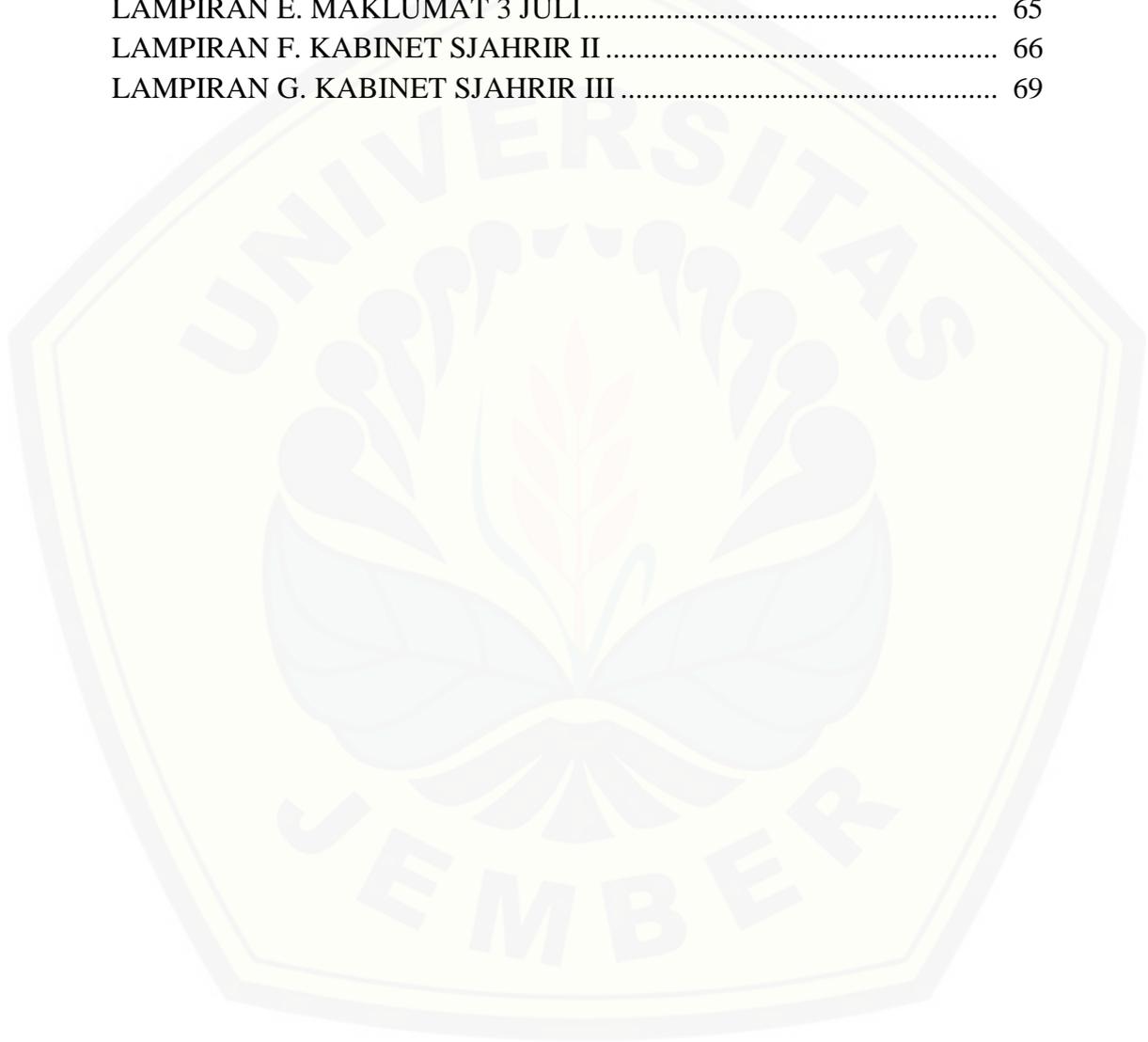
HALAMAN SAMBUTAN	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBING.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
RINGKASAN	viii
PRAKATA.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Penegasan Pengertian Judul.....	3
1.3 Ruang Lingkup Penelitian.....	5
1.4 Rumusan Masalah.....	6
1.5 Tujuan Penelitian	6
1.6 Manfaat Penelitian	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	8
BAB 3. METODE PENELITIAN.....	14
BAB 4. LATAR BELAKANG KONFLIK SUTAN SJAHRIR-TAN MALAKA	17
4.1 Perbedaan Ideologi Sjahrir – Tan Malaka	17
4.2 Surat Wasiat Sukarno-Hatta.....	23
5.1 Kabinet Sjahrir I dan Persatuan Perjuangan	29
5.1.1 Kabinet Sjahrir I.....	29
5.1.2 Persatuan Perjuangan.....	31
5.2 Kabinet Sjahrir II dan Peristiwa 3 Juli.....	36
5.2.1 Kabinet Sjahrir II	36

5.2.2 Peristiwa 3 Juli 1946.....	42
BAB 6. DAMPAK KONFLIK POLITIK ANTARA SUTAN SJAHRIR – TAN MALAKA TERHADAP KONDISI PEMERINTAHAN INDONESIA DAN PERSATUAN PERJUANGAN	45
6.1 Dampak Terhadap Pemerintahan Indonesia	45
6.2 Dampak Terhadap Persatuan Perjuangan	47
BAB 7. PENUTUP	49
7.1 Simpulan	49
7.2 Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN.....	56



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
LAMPIRAN A. MATRIK PENELITIAN.....	56
LAMPIRAN B. SURAT WASIAT SUKARNO-HATTA.....	57
LAMPIRAN C. KABINET SJAHRIR I.....	58
LAMPIRAN D. PUTUSAN KONGRES PP.....	59
LAMPIRAN E. MAKLUMAT 3 JULI.....	65
LAMPIRAN F. KABINET SJAHRIR II.....	66
LAMPIRAN G. KABINET SJAHRIR III.....	69



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan saat untuk pertama kalinya segala sesuatu yang serba paksaan dari penjajah asing hilang seketika. Tetapi peristiwa proklamasi juga bukan akhir dari perjuangan atau anti klimaks dari konflik elit para pejuang bangsa akan tetapi merupakan awal dari perjuangan mempertahankan kemerdekaan, dan revolusi Indonesia secara nyata (Jamil, 2018:37). Maka tidak heran jika yang terjadi bukanlah suatu bangsa yang serasih, melainkan suatu persaingan antara individu-individu dan kelompok-kelompok yang saling bertentangan.

Konflik yang terjadi antara para tokoh elit ini, mengenai perbedaan-perbedaan kekuatan untuk mendukung jalannya revolusi Indonesia. Pertentangan ini mengenai cara perjuangan bersenjata maupun perjuangan diplomasi. Perbedaan cara yang akan digunakan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia memang diperdebatkan oleh para elit, karena masih banyak tantangan yang harus dihadapi baik permasalahan internal maupun eksternal. Para tokoh elit seperti Sukarno, Hatta, Soebardjo, Sutan Sjahrir dan Tan Malaka tidak bisa dipisahkan dari permasalahan ini.

Sukarno dan Hatta setelah memimpin jalannya proklamasi Indonesia, juga terpilih menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia pertama atas keputusan PPKI, dan sekaligus pemimpin Kabinet Bucho atau kabinet pertama Republik Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan. Meskipun Sukarno-Hatta ini adalah Dwi-Tunggal, tetap saja kedua tokoh ini sering berbeda pendapat mengenai pembentukan Partai Nasional Indonesia dan terutama sekali mengenai sistem pemerintahan Indonesia yang akan dijalankan pada masa awal kemerdekaan tersebut. Meskipun pada akhirnya Hatta mengundurkan diri dari Wakil Presiden, perbedaan pemikiran antara kedua tokoh ini tidak merusak persahabatannya. Karena konflik antara Sukarno-Hatta berujung kepada integrasi Republik Indonesia dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Salah satu tokoh yang juga merupakan golongan tua dan berperan untuk bangsa ini adalah Ahmad Soebardjo. Perjuangan Soebardjo diawali saat dirinya menempuh pendidikan di Belanda. Pada masa penjajahan Belanda memang perjuangannya secara non-koperatif melalui tulisannya dan pidatonya pada liga anti imperialisme. Sedangkan, masa pendudukan Jepang Ahmad Soebardjo merubah cara perjuangannya mengikuti Sukarno-Hatta yaitu kooperatif. Tetapi, Soebardjo masih bisa menjadi penyatu antara golongan tua dan muda saat akan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan, Soebardjo juga masuk dalam Kabinet Bucho.

Permasalahan yang harus dihadapi ini, menciptakan banyak pemikiran dari para tokoh elit tersebut. Banyaknya pemikiran mengenai cara untuk menghadapi semua itu menimbulkan pertentangan antara para elit tersebut. Padahal sebenarnya masalah-masalah itu yang paling nampak pada pembentukan kabinet dan cara perjuangan diplomasi ataupun cara perjuangan fisik. Selain dari para golongan tua Sukarno, Hatta dan Soebardjo, hal tersebut juga tidak lepas dari peran tokoh pemuda yaitu Sutan Sjahrir serta Tan Malaka (Budyawan, 2008:43).

Sutan Sjahrir dan Tan Malaka merupakan tokoh yang sangat menonjol dalam golongan muda. Sehingga nama kedua tokoh elit golongan muda ini ada ditestamen politik Sukarno dan Hatta dalam surat wasiat tentang siapa yang akan menggantikannya sebagai pemimpin revolusi. “Keduanya memutuskan untuk membentuk empat sekawan ahli waris yang terdiri atas para pemimpin yang mewakili empat kelompok utama pendukung revolusi, yaitu: (1) Tan Malaka yang mewakili kelompok Marxist kiri yang ekstrem; (2) Sjahrir yang mewakili kaum sosialis moderat; (3) Iwa Koesoemasoemantri yang mewakili organisasi-organisasi muslim; dan (4) Wongsonegoro yang mewakili pegawai negeri lama dari golongan ningrat” (Kahin, 2013:217).

Pemikiran kedua tokoh pemuda ini juga menarik untuk dikaji karena kesadaran politik Sutan Sjahrir dan Tan Malaka sama-sama tumbuh saat keduanya berada di luar negeri. Pemikiran Sutan Sjahrir yang tercantum dalam tulisan *Perjuangan Kita* mengenai cara-cara untuk menjalankan suatu pemerintahan Republik yang baru merdeka. Sedangkan Tan Malaka dari Tulisannya yaitu

Muslihat mengenai bagaimana seharusnya suatu negara mendapat kemerdekaannya yang 100%. Sutan Sjahrir dan Tan Malaka juga sangat menonjol dalam gerakan-gerakan perjuangannya. Akan tetapi harus berkonflik karena perbedaan strategi politik untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.

Perbedaan pemikiran para *Founding Fathers* yang berujung pada terjadinya suatu konflik. Terutama sekali dalam nuansa politik para elit konstitusi yang berbicara tentang konsepsi kebangsaan. Perebutan dan pembagian kekuasaan yang tidak merata dari setiap golongan menjadi suatu faktor terjadinya konflik. Pertentangan mengenai kebijaksanaan yang akan diterapkan untuk kepentingan umum juga memicu terjadinya suatu konflik dalam pemerintahan, apalagi bangsa yang baru merdeka ini.

Hal itulah yang menjadi latar belakang penulis meneliti konflik yang terjadi antara Sutan Sjahrir dan Tan Malaka. Kedua tokoh yang sangat menonjol dalam revolusi mempertahankan kemerdekaan Indonesia, baik Sutan Sjahrir yang menjadi perdana menteri dan Tan Malaka membentuk oposisi pertama dalam sejarah republik ini. Maka dari itu, peneliti memilih permasalahan tersebut dengan judul “**Konflik Politik Sutan Sjahrir – Tan Malaka Tahun 1945-1947**”.

1.2 Penegasan Pengertian Judul

Penegasan pengertian judul ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahan persepsi sehingga tidak terjadi perbedaan pandangan dalam penelitian ini, harapan dari penulis dengan keseragaman persepsi tentang penelitian ini dapat mempermudah memahami penelitian yang berjudul “*Konflik Politik Sutan Sjahrir-Tan Malaka Tahun 1945-1947*”.

Istilah konflik menurut Webster dalam bukunya Pruitt dan Rubin (2011:9) dituliskan bahwa “*conflict*” di dalam bahasa aslinya berarti suatu “perkelahian, peperangan, atau perjuangan” – yaitu berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak. Tetapi arti kata itu kemudian berkembang dengan masuknya “ketidaksepakatan yang tajam atau oposisi atas berbagai kepentingan, ide, dan

lain-lain”. Pruitt dan Rubin (2011:21) menurut pendapatnya “konflik adalah persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*)”.

Haryanto dalam bukunya “*Elit, Massa dan Konflik*” (1991:69) juga berpendapat mengenai bentuk-bentuk konflik berdasarkan sifatnya yaitu ada 3. Pertama, konflik yang tidak ada dasar prinsipil; Kedua, konflik yang muncul atas perbedaan yang bersifat prinsipil akan tetapi tidak mengenai prinsip itu sendiri; dan ketiga, konflik yang muncul bertolak dari suatu dasar. Bentuk konflik pertama merupakan konflik yang tidak berhubungan dengan ideologi yang ada atau lepas dan hanya bersifat hal-hal yang praktis belaka. Konflik tipe kedua ini merupakan perbedaan mengenai kebijaksanaan yang menyangkut kepentingan umum. Terakhir tipe ketiga ini adalah perselisihan yang berkaitan dengan berlaku tidaknya ideologi tertentu bagi masyarakat. Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan konflik adalah perbedaan pandangan mengenai kepentingan yang ingin dicapai oleh suatu individu atau kelompok dan dapat juga terjadi pertikaian secara kontak fisik dari adanya perbedaan kepentingan serta bersifat prinsipil atau tidak.

Definisi “politik” menurut Peter Merkl adalah perebutan kekuasaan dan pengambilan keputusan untuk kepentingannya sendiri. Andrew Heywood juga menguraikan definisi politik yang berkaitan dengan konflik dan konsensus yaitu “politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak terlepas dari gejala konflik dan kerjasama” (Budiardjo, 2008:16).

W.A. Robbon dalam Miriam Budiardjo (2008:18) juga menjelaskan bahwa “politik tertuju pada perjuangan untuk mencapai atau mempertahankan kekuasaan, melaksanakan kekuasaan, atau pengaruh atas orang lain, atau menentang pelaksanaan kekuasaan itu”. Maka dapat disimpulkan bahwa politik merupakan usaha untuk mendapatkan kekuasaan dan cara untuk menjalankan kekuasaan itu ataupun cara-cara menentang kekuasaan itu sendiri. Serta Budiardjo (2008:18) juga menyimpulkan bahwa politik merupakan semua kegiatan yang menyangkut masalah memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan.

Definisi politik yang digunakan penulis lebih memfokuskan pada ilmu politik dari sudut pandang kekuasaan, karena dalam penelitian ini lebih fokus kepada permasalahan antara pihak pemerintah dan oposisi yang saling ingin memimpin pemerintahan Indonesia. Pihak pemerintah dan oposisi ini sama-sama menggunakan pengaruhnya untuk menyatukan massa agar tujuannya tercapai.

Berdasarkan penjelasan atau uraian diatas, dalam konteks penelitian ini yang dimaksudkan oleh penulis dari judul “*Konflik Politik Sutan Sjahrir-Tan Malaka Tahun 1945-1947*” adalah perubutan kekuasaan melalui pamflet-pamflet antara Sutan Sjahrir dan Tan Malaka. Serta pemerintahan kabinet Sutan Sjahrir yang tidak disepakati oleh semua tokoh elit hingga terbentuknya barisan oposisi untuk menentang suatu kekuasaan tersebut yang dipimpin oleh Tan Malaka.

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan batas-batas dalam penelitian ini seperti halnya materi, waktu dan tempat. Ruang lingkup penelitian dimaksudkan untuk mencegah penyimpangan dari fokus permasalahan yang akan dikaji penulis. Penulis membatasi lingkup materi pada kajian sejarah politik yang fokusnya merupakan konflik Pemerintah dan oposisi yaitu konflik Perdana Menteri Sutan Sjahrir dan Tan Malaka.

Ruang lingkup waktu (temporal) dalam penelitian ini penulis memulainya pada tahun 1945 sampai tahun 1947. Tahun 1945 adalah terbentuknya kabinet Sjahrir I pada 14 November 1945. Sedangkan tahun 1947 merupakan turunnya Sjahrir sebagai Perdana Menteri pada kabinetnya yang ke-3 tanggal 27 Juni 1947. Tetapi dalam menentukan ruang lingkup ini tidak bersifat mutlak melainkan fleksibel, karena tidak menutup kemungkinan penulis akan membahas kejadian sebelum tahun 1945 maupun sesudah tahun 1947.

Ruang lingkup tempat penulis memfokuskan pada peristiwa yang terjadi di Indonesia dan tempat-tempat yang menyangkut terjadinya konflik para elit politik ini. Sedangkan ruang lingkup materi yaitu mengenai konflik masa kabinet Sutan Sjahrir dengan Tan Malaka yang merupakan pemimpin dari pihak oposisi tahun 1945-1947.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah penulis uraikan diatas, maka rumusan masalah yang dapat disusun dalam penelitian ini antara lain:

1. Apa saja yang melatarbelakangi terjadinya konflik antara Sutan Sjahrir-Tan Malaka tahun 1945-1947?
2. Bagaimana situasi politik pemerintahan Sutan Sjahrir menghadapi Tan Malaka sebagai barisan oposisi pada tahun 1945-1947?
3. Bagaimana dampak konflik politik antara Sutan Sjahrir-Tan Malaka terhadap kondisi pemerintahan Indonesia dan Persatuan Perjuangan?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan dikaji diatas, maka adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis latar belakang konflik antara Sutan Sjahrir-Tan Malaka tahun 1945-1947;
2. Untuk mengkaji dan menganalisis situasi politik pemerintahan Sutan Sjahrir menghadapi Tan Malaka sebagai barisan oposisi pada tahun 1945-1947;
3. Untuk mengkaji dan menganalisis dampak konflik politik antara Sutan Sjahrir-Tan Malaka terhadap kondisi pemerintahan Indonesia tahun 1945-1947.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian diatas, maka manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis, penelitian ini merupakan usaha penulis untuk mendalami materi sejarah nasional dan juga berlatih dalam menulis serta berfikir kritis mengenai sejarah konflik politik Sutan Sjahrir dan Tan Malaka tahun 1945-1947;
2. Bagi mahasiswa sejarah, untuk menambah pengetahuan sejarah serta mendalami fakta-fakta terkait konflik politik Sutan Sjahrir dan Tan Malaka pada awal kemerdekaan terutama masa kabinet Sjahrir I, II dan III;

3. Bagi almamater, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan sebagai wujud nyata pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Dharma Penelitian dan menambah khasanah keputakaan Universitas Jember;
4. Bagi peneliti lain, untuk bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian yang sejenis ataupun pengembangannya.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka di bab ini mengemukakan penjelasan buku ataupun hasil penelitian terdahulu seperti skripsi, jurnal maupun tesis yang dapat mendukung dan berkaitan dengan pembahasan yang akan menjadi fokus kajian penulis, yang berjudul “Konflik Politik Sutan Sjahrir-Tan Malaka Tahun 1945-1947”. Pada bab ini juga penulis akan mengungkapkan perbedaan dari penelitian yang telah ada sebelumnya. Penulis juga akan mengungkapkan pendekatan dan teori yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini.

Permasalahan mengenai konflik para elit politik masa awal kemerdekaan dibahas dalam buku Ben Anderson “Revoloesi Pemoeda: Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946”, dalam buku ini dijelaskan bahwa dalam menuju pemerintahan republik Indonesia yang baru merdeka ini masih sangat banyak tantangan yang harus dilewati baik masalah internal maupun eksternal. Masalah internal yang harus dihadapi adalah merupakan konflik antara golongan nasionalis tua dan para pemuda mengenai permasalahan dalam penyesuaian dalam PNI dan KNIP. Bersamaan dengan hal tersebut, kemerosotan dalam bidang organisasi politik dan militerpun terjadi karena dibubarkannya organisasi bentukan Jepang oleh pemimpin-pemimpin Jepang sendiri. Sedangkan permasalahan eksternal yang harus dihadapi kedepannya adalah sekutu yang akan datang dan menguasai Indonesia kembali. Masalah internal konflik antara kaum elit ibu kota pun terus terjadi, hingga adanya suatu gerakan yang dalam buku ini dikatakan “kudeta diam-diam”. Kudeta yang dilakukan untuk perubahan suatu sistem demokrasi presidensiil kepada sistem demokrasi setengah parlementer, tokoh pemuda yaitu Sutan Sjahrirlah yang menjadi tonggak awal dari peralihan sistem demokrasi ini dengan terciptanya multipartai. Dalam hal ini, Sjahrir pun sangat diterima untuk memimpin suatu sistem pemerintahan baru karena dekat dengan banyak elit ibu kota. Sjahrir juga akan diterima dengan baik oleh sekutu, karena anggapan kolaborator Jepang tidak melekat terhadap dirinya.

Buku ini juga menjelaskan mengenai Perjuangan yang dilakukan oleh kedua tokoh pemuda pada masa itu, yaitu Sjahrir dengan pamflet “perjuangann

kita” juga Tan Malaka dengan Persatuan Perjuangannya. Sjahrir dengan pamfletnya sangat mengkritisi pemerintahan Sukarno (Kabinet Bucho) dan juga bagaimana krisis pemuda pada saat itu. Sedangkan Tan Malaka dengan partai PP sangat mengkritisi pembentukan kabinet Sjahrir dan programnya saat menghadapi kedatangan sekutu. Konflik antara Sutan Sjahrir dan Tan Malaka inipun menurut penulis sangat penting untuk diteliti, dengan memfokuskan pada konflik dari kedua tokoh elit ini.

Maya Nurul Azmi (2013) merupakan mahasiswa S1 pendidikan sejarah universitas Jember yang penelitiannya berjudul “*Perjuangan Diplomasi Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945-1950*” yang menjelaskan mengenai politik intern terhadap pembentukan NKRI. Perjuangan mempertahankan NKRI setelah kemerdekaan mendapat dukungan penuh dari para tokoh di daerah-daerah. Dinamika politik Indonesia diawali keinginan Belanda untuk menguasai Indonesia kembali, dalam mempertahankan kemerdekaan serta keutuhan NKRI. Disisi lain Indonesia juga berusaha untuk mendapatkan pengakuan dunia Internasional sehingga perjuangan bangsa Indonesia kali ini lebih mengutamakan perjuangan diplomasi. Sukarno, Hatta dan Sjahrir telah sepakat untuk menggunakan perjuangan diplomasi akan tetapi Tan Malaka menolak atau berbeda pandangan dengan 3 tokoh elit politik itu, dikarenakan Tan Malaka menginginkan perjuangan dengan kekuatan senjata.

Hasil penelitian dari Stephanus Agung Budyawan (2008) tentang “*Oposisi Revolusioner: Pemikiran Tan Malaka dan Gerakan Persatuan Perjuangan di masa Revolusi Indonesia 1945-1946*” menjelaskan bahwa gagasan Tan Malaka yang begitu radikal saat masa revolusi kemerdekaan Indonesia, tertuang dalam tulisan-tulisannya yang tertuang dalam 3 brosur penting antara lain muslihat. Tan Malaka juga merupakan tokoh yang memelopori barisan oposisi pemerintah yaitu Persatuan Perjuangan. Menurut pandangan PP yang dimotori kaum muda, masa-masa revolusi atau mempertahankan kemerdekaan rakyat harus mendapat kemerdekaan 100% tanpa melalui jalan diplomasi tetapi menggunakan jalan yang lebih radikal dalam perjuangan. Keruntuhan PP sangat dipengaruhi oleh peran pemerintah yang menangkap para tokoh pihak oposisi tersebut. “Penangkapan-

penangkapan yang dialami para tokoh PP praktis menghentikan laju pergerakan, ini menunjukkan masih terfokusnya PP pada figur tokoh” (2008:104).

Masdar Hilmi (2009) tentang “*Penculikan Perdana Menteri Sjahrir di Surakarta Tahun 1946*”, skripsi ini menjelaskan tentang perjalanan pemerintahan kabinet Sjahrir I yang terbentuk pada 14 November 1945. Kabinet Sjahrir I ini memunculkan banyak ketidakpuasan terutama setelah terbentuknya pihak oposisi Persatuan Perjuangan beranggapan kurang representatifnya susunan menteri dan program pemerintah yang tidak menekankan perjuangan melawan belanda. akibat tekanan yang begitu besar dari PP akhirnya perdana menteri Sjahrir memilih mundur. Tetapi, Sukarno selaku Presiden kembali menunjuk Sjahrir untuk membentuk kabinet. Kabinet Sjahrir II ini kembali mendapat tekanan dari pihak oposisi karena usul perundingan dengan Belanda diketahui umum terutama PP, hingga kekecewaan tersebut dilampiaskan dengan menculik Perdana Menteri Sjahrir di Surakarta pada 28 Juni 1946. Serta penjelasan mengenai peristiwa sekitar peristiwa 3 juli 1946, dimana pembebasan Sjahrir dan rombongan tanggal 1 Juli 1946 serta penangkapan para pelaku dan tokoh yang terkait dengan penculikan Sjahrir.

Andri Pradinata (2014) penelitian sejarah untuk sumbangan terhadap materi pembelajaran sejarah tentang “*Perjuangan Tan Malaka dan Pengaruhnya Terhadap Kebijakan Diplomasi Indonesia Belanda 1945-1949 (Sumbangan Materi Pembelajaran Sejarah Kelas XI IPA SMA Negeri 1 Pagaram)*”, pembahasan skripsi ini mengenai lahirnya pergerakan Persatuan Perjuangan adalah bentuk kekecewaan dari kebijakan yang diambil pemerintahan saat itu untuk menghadapi Belanda melalui jalan diplomasi. Padahal jalan diplomasi sama sekali tidak menemui kesepakatan kedua belah pihak, malahan merugikan Indonesia hingga mengharuskan adanya pemerintahan darurat Indonesia. “*Tuntutan kelompok Persatuan Perjuangan adalah pengakuan atas kemerdekaan Indonesia oleh Belanda sebelum dilakukan perundingan hal itulah di inginkan agar perundingan dilakukan oleh negara yang mempunyai kedudukan yang sama dengan Belanda itu sendiri*” (2014:76-77).

Penelitian-penelitian yang telah dipaparkan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa meskipun Indonesia telah dinyatakan merdeka pada 17 Agustus 1945 tetap saja masih ada penentangan baik internal ataupun eksternal. perbedaan pandangan atau sikap secara politik yang menjadi dasar konflik internal pada negara yang baru merdeka ini. Sedangkan disisi yang lain Belanda masih sangat menginginkan Indonesia ini kembali berada dibawah kekuasaannya. Konsep-konsep dalam mempertahankan serta perjuangan untuk membentuk awal konstitusi Indonesia ini masih ada beberapa tokoh yang berkonflik, sama halnya seperti saat akan diproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi pada masa ini yang lebih mencolok akan konflik internal ini adalah para tokoh elit politik baik pemerintah maupun pihak berpengaruh atau pihak oposisi. Konflik yang sangat mencolok adalah masa pemerintahan kabinet Sjahrir dengan Persatuan Perjuangan yang dipimpin oleh Tan Malaka, mengenai susunan kabinet maupun program pemerintah untuk mempertahankan kemerdekaan melawan Belanda hingga terjadinya peristiwa penculikan Perdana Menteri Sjahrir dan kudeta yang dianggap dilakukan oleh Persatuan Perjuangan yang dipimpin Tan malaka kepada pemerintahan Sjahrir tanggal 3 Juli 1946.

Berdasarkan uraian penelitian-penelitian terdahulu yang dijelaskan diatas, penelitian tersebut lebih memfokuskan pada usaha-usaha yang dilakukan oleh tokoh pemerintahan terutama Perdana Menteri Sjahrir serta peran salah satu pihak oposisi Persatuan Perjuangan yaitu Tan Malaka. Maka dari itu, dalam penelitian-penelitian diatas masih ada celah-celah untuk diteliti yang memfokuskan pada konstelasi politik Indonesia dari awal terbentuknya Kabinet Sjahrir I menjadi awal demokrasi parlementer Indonesia serta perjalanan kabinet Sjahrir II hingga terjadinya *Peristiwa 3 Juli 1946* dan turunya Sjahrir tahun 1947. Penelitian ini menjadi pelengkap terhadap penelitian sebelumnya. Penulis sangat berharap penelitian ini dapat dikembangkan oleh penulis lain untuk menyempurnakan kajian materi. Penelitian ini juga merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang masih belum menyinggung tentang konstelasi politik Indonesia mengenai konflik elit seperti Sutan Sjahrir dan Tan Malaka sebagai gerakan awal oposisi di Republik Indonesia ini hingga terjadinya peristiwa 3 Juli 1946.

Penulisan skripsi ini membutuhkan pendekatan untuk menganalisis permasalahan terkait konflik elit politik pada masa kemerdekaan Indonesia dengan tujuan mempermudah dalam penulisan sejarah. Mengenai suatu peristiwa sejarah sangat tergantung pada pendekatan, ialah dari segi mana kita memandangnya, dimensi yang diperhatikan, unsur-unsur yang diungkapkan. Hasil pelukisan akan ditentukan oleh jenis pendekatan yang dipakai (Kartodirdjo, 1992:4).

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sosiologi politik. Menurut pendapat Duverger (1996:18) sosiologi politik adalah ilmu tentang kekuasaan, pemerintahan, otoritas, komando di dalam semua masyarakat, bukan saja di dalam masyarakat nasional. sosiologi politik merupakan paham bahwa politik mencakup baik konflik antara individu-individu dan kelompok untuk memperoleh kekuasaan, yang dipergunakan oleh pemenang bagi keuntungannya sendiri atas kerugian dari yang ditaklukkan, maupun usaha untuk menegakkan ketertiban sosial yang berguna bagi semua orang. Studi tentang kekuasaan ini juga di dalam setiap struktur masyarakat, di mana tempat terjadinya konflik-konflik dan integrasi. Pendekatan sosiologi politik dalam penelitian ini digunakan penulis untuk cara pandang atau melihat suatu antagonisme politik dari tokoh elit pemerintah seperti Sutan Sjahrir dan pihak oposisi Tan Malaka serta usaha-usaha yang dilakukan dalam memnciptakan suatu integrasi bangsa.

Sedangkan untuk memperdalam kajian dari pendekatan yang telah disebutkan, penulis menggunakan teori dalam penelitian ini. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori konflik Duverger. Penelitian ini lebih banyak mengkaji perbedaan-perbedaan dari para tokoh elit yang memerintah maupun diperintah. Antagonisme politik disini akan berkembang menjadi konflik, bentuk-bentuk konflik salah satunya adalah strategi politik yang digunakan. Dalam teori konflik Duverger juga dijelaskan (1996:310) suatu masyarakat tanpa konflik tidak berintegrasi secara riil bilamana individu-individu yang menjadi unsur-unsurnya tetap berdiri satu disamping yang lain. Artinya penelitian ini menggunakan teori konflik Duverger karena antagonisme tokoh elit politik Tan Malaka yang menjadi latar belakang pihak oposisi hingga terjadinya konflik pada

masa kabinet Sjahrir untuk mencapai suatu tantangan pemerintahan yang baik dan kemerdekaan Indonesia yang diakui oleh negara lain. Ini lah yang menjadi alasan penulis memilih analisis konflik, karena perbedaan kepentingan dan strategi politik dari kelompok pemerintah dan kelompok oposisi.



BAB 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah, maka sangat perlu untuk memperhatikan metode penelitiannya. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah. Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau (Gottschalk, 1985:32). Adapun langkah-langkah dalam metode sejarah ini yaitu : (1) heuristik; (2) kritik; (3) interpretasi; dan (4) historiografi.

Langkah pertama penelitian ini adalah heuristik yaitu mengumpulkan atau menemukan sumber. Pada tahap ini peneliti berusaha mengumpulkan sumber-sumber yang berhubungan dengan konflik politik Sutan Sjahrir dan Tan Malaka baik berupa buku maupun penelitian terdahulu. Sumber-sumber ini berupa sumber primer yang merupakan sumber tertulis dari orang-orang yang melihat langsung atau saksi pandangan mata terhadap peristiwa yang terjadi. Sumber berikutnya yaitu sekunder, sumber yang ditulis oleh orang-orang yang tidak melihat langsung atau bukan saksi pandangan mata dari peristiwa yang terjadi (Gottschalk, 1985:35).

Kegiatan dalam mencari dan mengumpulkan sumber ini, penulis melakukan penelusuran di beberapa perpustakaan seperti perpustakaan Universitas Jember, perpustakaan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya dan perpustakaan Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Selain dari perpustakaan penulis juga banyak memperoleh dari toko buku dan koleksi pribadi.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, maka penulis berhasil menemukan beberapa sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer yang ditemukan buku-buku tentang Tan Malaka antara lain autobiografi Tan Malaka berjudul "*Dari Penjara ke Penjara jilid 3*", "*Merdeka 100%*", "*Gerpolek, Gerilja-Politik-Ekonomi*", "*Muslihat, Politik & Rencana Ekonomi Berjuang*", "*Catatan-catatan Perjuangan (1946-1948)*"; buku Sutan Sjahrir "*Sosialisme Indonesia Pembangunan Kumpulan Tulisan Sutan Sjahrir*"; juga yang berjudul "*Renungan dan Perjuangan*" buku-buku tersebut merupakan karya dari orang yang

mengalami langsung atau pelaku langsung peristiwa tersebut. Serta buku karangan Rudolf Mrazek “*Sjahrir Politik dan Pengasingan di Indonesia*”.

Penulis juga mendapatkan beberapa sumber sekunder diantaranya buku Benedict Anderson yang berjudul “*Revolusi Pemuda Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946*”, buku karya Goerge McTurnan Kahin berjudul “*Nasionalisme dan Revolusi Indonesia*”, M.C Ricklefs “*Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*”. Adapula beberapa sumber-sumber pendukung lainnya yang dibutuhkan dalam rekonstruksi penelitian ini. Semua sumber diatas merupakan yang digunakan penulis sebagai bahan rujukan dalam penulisan karya ilmiah ini.

Langkah kedua dari penelitian ini adalah kritik sumber. Kritik sumber ini untuk mendapatkan otentisitas atau keaslian sumber melalui kritik ekstren dengan melakukan penelitian fisik terhadap buku atau dokumen. Penulis dalam kritik ekstren ini menguji dokumen atau buku tulisan dari pelaku sejarah serta beberapa sumber pendukung dari tampilan fisik luar, latar belakang penulis sumber serta tahun terbit buku sehingga dapat terlihat dengan jelas keaslian sumber-sumber yang telah diperoleh. Selanjutnya kritik intern untuk menguji (kredibilitas) sumber artinya suatu sumber tidak hanya dilihat sisi luarnya saja. Penulis menggunakan kritik intern untuk menilai kebenaran isi dari buku yang digunakan sebagai sumber. Diharapkan dengan melakukan kritik semacam itu dapat menghasilkan fakta yang relevan terhadap penelitian ini.

Langkah ketiga dari metode penelitian sejarah ini adalah interpretasi. Interpretasi merupakan proses penafsiran penulis terhadap fakta sejarah yang sudah dikumpulkan (Pranoto, 2010:55). Fakta sejarah yang telah dikumpulkan penulis melalui kajian terhadap buku-buku dan hasil penelitian terdahulu yang didalamnya membahas fakta-fakta yang relevan terhadap penelitian ini, sehingga diperoleh cerita sejarah mengenai “*Konflik Politik Sutan Sjahrir-Tan Malaka Tahun 1945-1947*”. Penulis dalam hal ini merangkai fakta satu dengan fakta yang lain, sehingga menjadi satu-kesatuan yang logis. Selanjutnya ditafsirkan serta dirangkai menjadi fakta sejarah yang saling berhubungan dengan realitas yang ada.

Langkah terakhir atau keempat dalam metode penelitian sejarah adalah mensintesa dari pada sumber-sumber yang telah didapat secara terpercaya, yaitu historiografi (Gottschalk, 1985:32). Setelah melalui tiga tahap sebelumnya dari metode penelitian sejarah ini, langkah terakhir penulis adalah menyusun, merangkai dan menulis sejarah secara kronologis, logis serta sistematis sehingga dapat menghasilkan karya tulis ilmiah yang dapat merekonstruksi mengenai “*Konflik Politik Sutan Sjahrir-Tan Malaka Tahun 1945-1947*”.

Langkah historiografi ini, dalam merekonstruksi kembali dengan sistematika penulisan yang berisi 6 bab. Bab 1 terdapat pendahuluan mencakup latar belakang peneliti dalam memilih judul “Konflik Politik Sutan Sjahrir-Tan Malaka Tahun 1945-1947”, penegasan pengertian judul, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Bab 2 merupakan tinjauan pustaka yang berisi penjelasan dari penelitian terdahulu dan beberapa sumber terkait mengenai judul penelitian, pendekatan serta kajian teori yang relevan bagi penelitian ini. Bab 3 adalah metode penelitian yang digunakan oleh penulis yakni metode sejarah terdiri dari 4 tahap baik prosedur penelitian serta sumber penelitian. Bab 4 yaitu pembahasan tentang latar belakang konflik antara Sutan Sjahrir dan Tan Malaka. Bab 5 menjelaskan tentang konflik politik Sutan Sjahrir dengan Tan Malaka tahun 1945-1947. Bab 6 berisi mengenai dampak dari konflik politik antara Sutan Sjahrir dan Tan Malaka. Bab 7 mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang telah dilakukan oleh penulis.

BAB 4. LATAR BELAKANG KONFLIK SUTAN SJAHRIR-TAN MALAKA

Ideologi merupakan suatu puncak pemikiran seorang tokoh tentu memiliki faktor-faktor yang berbeda-beda. Faktor pembentukan karakter hidup seorang dimilikinya sejak lahir, faktor lingkungan serta pendidikan. Begitu pula dengan Sutan Sjahrir dan Tan Malaka yang memiliki ide atau pemikiran berbeda. Sutan Sjahrir dan Tan Malaka adalah orang-orang yang memiliki kecerdasan serta pemikiran yang bebas.

Ideologi yang dianut oleh Sutan Sjahrir dan Tan Malaka sangat berbeda, walaupun kedua tokoh ini sama-sama berasal dari suku minang. Akan tetapi pendidikan serta pengalaman tempat bersosialisasi yang berbeda membuat kedua tokoh ini memiliki ideologi yang berbeda. Perbedaan ideologi ini akhirnya membuat Sutan Sjahrir dan Tan Malaka berbeda dalam tindakan-tindakan politiknya. Tetapi kedua tokoh ini memiliki pengalaman yang berbeda seperti halnya Sutan Sjahrir dengan kelompok sebagai gerakan bawah tanah, sedangkan Tan Malaka yang harus menjadi tahanan politik Belanda dan diasingkan hingga baru kembali ke-Indonesia pada tahun 1942.

4.1 Perbedaan Ideologi Sjahrir – Tan Malaka

Sutan Sjahrir lahir pada tanggal 5 Maret 1909 di Padang Panjang, Sumatra Barat. Sutan Sjahrir yang lahir dari keluarga kaya membuatnya merasakan gaya hidup kebarat-baratan. Ayah Sjahrir sebagai jaksa serta ibunya yang memang memiliki gaya kebarat-baratan dapat dilihat dari kesukaan terhadap opera barat atau seperti halnya sirkus yang digrlar berkeliling di daerah kelahiran Sjahrir. Pola hidup serta gaya Sjahrir membuatnya dapat merasakan pendidikan selayaknya, juga politik etis Belanda yang akhirnya membuat Sjahrir dapat terus mengasah keilmuannya hingga ke Negeri Belanda. Sutan Sjahrir bersekolah di *Europese Lagere School* dan *MULO* di Medan merupakan sekolah pertama Sjahrir. Setelah itu bersekolah menengah di *AMS-A* Bandung, kemudian tahun 1929 berangkat ke Belanda untuk belajar di Universitas Amsterdam.

Sutan Sjahrir menempuh pendidikan di Amsterdam Belanda bersama Moh. Hatta. Pada tahun 1925 Bung Hatta menjadi ketua Perhimpunan Indonesia sedangkan Sutan Sjahrir baru Tahun 1930 aktif dalam organisasi Perhimpunan Indonesia menjadi sekretaris. Setelah mendengar kabar bahwa penangkapan terhadap Sukarno dan kawan-kawannya karena Partai Nasional Indonesia yang dianggap illegal maka Sutan Sjahrir memutuskan untuk kembali ke Indonesia.

Sutan Sjahrir pun terpilih menjadi ketua PNI-Baru karena karya-karyanya dapat diterima oleh orang banyak. Pengalaman Sutan Sjahrir dalam organisasi memang sangat banyak, karena Sutan Sjahrir juga pernah aktif atau menjadi pemimpin Kongres kaum buruh Indonesia hingga akhirnya Sutan Sjahrir ditangkap karena anggapan bahwa PNI-baru melakukan pemberontakan pada tahun 1933 (Hidayat, 2016:36).

Pendidikan tinggi Sjahrir serta pengalamannya diorganisasi dan Serikat Pekerja Buruh membuat Sjahrir tetap teguh memperjuangkan kemerdekaan Indonesia meskipun pada akhirnya dipenjara. Penangkapan Sutan Sjahrir atau dipenjarakan pada tempat seperti Banda Neira, Digul dan Cipinong malah membuatnya terus terpengaruh oleh pemikiran tokoh filsafat timur dan barat. Semangatnya tetap tidak menurun, karena pada masa pendudukan Jepang dirinya juga jadi pemimpin gerakan bawah tanah para pemuda untuk menentang fasisme Jepang tahun 1942-1945 (Anwar, 1966:18).

Sebagai salah satu tokoh yang terpengaruh oleh pemikiran sosialisme, tentu saja Sjahrir akan terus memperjuangkan cita-cita kerakyatannya. Menurut Sjahrir sistem demokrasi sangat diperlukan untuk diterapkan di Indonesia karena Sjahrir khawatir akan adanya feodalisme gaya baru dalam negerinya, dengan memberi kesempatan kepada para elit politik kembali seperti raja-raja yang memeralat rakyatnya (Sjahrir, 1982:32).

Setelah Proklamasi kemerdekaan pun Sjahrir terus memperjuangkan cita-cita pemikiran demokrasi. Pemikiran Sutan Sjahrir tertuang dalam karya-karya tulisannya yaitu "Perjuangan Kita" yang berisikan 2 pokok pikiran penting yaitu (1) Revolusi Indonesia adalah revolusi demokrasi, baru setelah itu revolusi

Nasional; (2) cara mengatasi kesulitan republik pada waktu itu, harus memelihara hubungan baik dengan kekuatan berpengaruh di Asia yaitu Inggris dan Amerika.

Pemikiran Sutan Sjahrir ini juga dapat diterima oleh wakil presiden Moh. Hatta hingga terjadi perubahan dari sistem pemerintahan presidensiil menjadi sistem parlementer, karena sistem pemerintahan yang demokratis adalah memang sistem parlementer. Serta Sutan Sjahrir terus berusaha untuk menghilangkan fasisme Jepang agar mempermudah Indonesia mendapat pengakuan Dunia Internasional bahwa Indonesia telah merdeka.

Sjahrir yang merupakan salah satu tokoh sosialis memang menginginkan pembentukan partai untuk terciptanya suatu sistem parlementer serta cita-cita demokrasi yang menginginkan terlaksanakannya pemilihan umum di Indonesia. Menurut Sjahrir sosialisme harus dicapai dengan menyelenggarakan demokrasi politik sehingga dapat dilaksanakan menjadi demokrasi ekonomi dan sosial (Sjahrir, 1982:44).

Sementara Tan Malaka atau Ibrahim Datuk Tan Malaka adalah kelahiran Pandan Ganang, Suliki, Sumatra Barat pada tanggal 2 Juni 1897. Pemikiran Tan Malaka dituliskan dalam bukunya yang berjudul *Madilog* (*Matrealisme, Dialektika, Logika*). Tan Malaka dalam menulis buku *Madilog* ini dari tahun 1942 sampai pertengahan 1943 kurang lebih 8 bulan dan melakukannya 3 jam sehari (Tan Malaka, 1951:1). Tan Malaka menulis buku ini agar menjadi suatu landasan berfikir bagi rakyat Indonesia, karena *matrealisme* menurutnya adalah cara berpikir yang realistik, pragmatis dan fleksibel. Sedangkan, *dialektis* merupakan cara berpikir dalam upaya mengubah pola pikir pasif atau dogmatis. Cara berpikir *dialektis* ini yaitu dengan cara thesis, antithesis dan sintesis. Tan Malaka bertujuan mengajak untuk berpikir aktif secara terus-menerus tetapi tetap berlandaskan akal atau logika (Budyawan, 2008:19-20).

Orang pertama yang menulis konsep Republik Indonesia tahun 1925 dalam bukunya yang berjudul "*Naar de Republik Indonesia* (Menuju Republik Indonesia)". Tulisan pemikirannya ini jauh lebih dulu dibandingkan dengan Hatta dan Sukarno yang menulis tentang "Menuju Indonesia Merdeka". Sehingga Moh.

Yamin dan Sukarno menjulukinya sebagai “Bapak Republik Indonesia” dan “seorang yang mahir dalam revolusi” (Tempo, 2010:2).

Tan Malaka juga berpendapat mengenai syarat dan taktik mempertahankan kemerdekaan Indonesia, dituliskannya dalam buku *Muslihat* pada 2 Desember 1945 di Surabaya. Tan Malaka menjelaskan bahwa mengenai rencana Inggris dan NICA yang akan melucuti senjata Jepang, tetapi Tan Malaka mengingatkan bahwa Perdana Menteri Inggris hanya mengakui Hindia Belanda saja. Maka, tidak mungkin maksud Inggris melucuti senjata dari Jepang yang sudah mempertahankan status quo Indonesia akibat kekalahan perang, jelas sudah bahwa Inggris akan melucuti senjata rakyat Indonesia untuk menguasai kembali kebun, pabrik, dan tokonya (Tan Malaka, 2014:60-61). Maka dari itu, syarat negara merdeka adalah kemauan untuk mempertahankan kemerdekaan melalui taktik strategi perjuangan yang tepat.

Perjuangan mempertahankan kemerdekaan dengan syarat dan taktik strategi ini, menurut Tan Malaka kita harus mengetahui kelemahan dan kekuatan lawan. Alangkah lebih baik jikalau perjuangan ini dengan memegang senjata, karena iklim bumi memihak pada kita. Tan Malaka juga mengakatan kalau perjuangan diplomasi juga perlu, perjuangan diplomasi yang diinginkan oleh Tan Malaka bukan diplomasi bertekuk lutut, bukan diplomasi yang setengah-setengah tetapi diplomasi untuk kemerdekaan 100% sempurna.

Pemikiran politiknya ditulis pada sekitaran tanggal 17-24 Desember 1945 juga di Surabaya. Tulisan tentang politik ini mengenai mengisi kemerdekaan, bentuk Negara dan kedaulatan, aksi parlementer atau aksi murba dan merdeka 100%. Tulisannya ini memang dengan bahasa dan alur yang sederhana sehingga mempermudah rakyat untuk memahaminya.

Tan Malaka menjelaskan mengenai bentuk-bentuk negara seperti *Monarchie Absolute*, *Monarchy Constitutional* dan Republik. Bentuk pertama adalah suatu bentuk kerajaan tunggal, di mana dalam kerajaan tunggal itu kemauan raja tak ada batasnya. *Monarchy Constitutional* merupakan kekuasaan yang dibatasi oleh suatu undang-undang dibikin oleh rakyat, dalam kesimpulannya yaitu bentuk kerajaan yang terbatas. Sedangkan bentuk Republik

ini, di mana suatu kekuasaan raja dan keluarganya tidak ada sama sekali. Dalam suatu Republik, Negara itu diperintah menurut undang-undang. Perintah itu terletak di tangan Presiden dan menteri, beserta sidang pusat dan daerah, dan sebagian juga di Mahkamah Tertinggi (Tan Malaka, 2014:85). Tan juga melanjutkan penjelasannya, bahwa pembagian pemerintah dalam republik itu ada 3 yaitu, kekuasaan membikin undang-undang, menjalankan undang-undang dan mengawasi undang-undang.

Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi, dalam dasar Republik seharusnya kedaulatan itu berada di tangan rakyat. Undang-undang itu dibikin oleh para wakil rakyat. Penjelasan mengenai kedaulatan ini, menurut Tan Malaka adalah di mana kekuasaan rakyat itu sangat diutamakan. “Suara rakyat itu bukan saja teknik yang penting gampang dalam buat suatu pemerintahan. Tetapi, suara rakyat itu juga ukuran jauhnya kemerdekaan rakyat dalam suatu Negara” (Tan Malaka, 2014:90).

Bentuk dan isi kemerdekaan merupakan dua hal yang berbeda atau terpisah. Isi kemerdekaan adalah suatu kekuasaan, dalam kekuasaan itu sendiri terdapat hak lahir dan hak batin. Tan Malaka menuliskan bahwa :

“Hak lahir ialah hak atas keperluan hidup, seperti makanan, pakaian, perumahan, gaji dan sebagainya. Hak bathin ialah hak buat merdeka, berkumpul, menulis, hak buat melindungi harta, kemerdekaan dan jiwa, yang di zaman Revolusi Perancis dinamai hak manusia” (Tan Malaka, 2014:92).

Hak lahir dan hak bathin ini lebih banyak diperoleh dalam bentuk Negara kerajaan. Tetapi dalam bentuk Negara Republik, masih terdapat beberapa 3 bentuk. Pertama bentuk Aristokrasi di mana kaum ningrat yang berkuasa, bentuk plutokratis yaitu golongan hartawanlah yang berkuasa. Serta ada pula bentuk demokrasi, disinilah rakyat yang berkuasa. Bentuk Republik yang demokrasi inilah, hak lahir dan bathin dapat dirasakan oleh seluruh rakyat.

Proses mengisi kemerdekaan ini, dalam pemikiran politik Tan Malaka menawarkan dua aksi atau jalan yaitu aksi parlementer atau aksi murba. Aksi parlementer merupakan perebutan kursi terbanyak dalam parlemen untuk mengakomodir kepentingan rakyat murba itu sendiri. Akan tetapi, parlemen

sekarang lebih banyak dikuasai oleh para kapitalis. Zaman kapitalisme ini, dalam suatu Negara yang menyangkut administrasi dan birokrasi telah dikuasai oleh kaum borjuis atau orang kaya. Maka dari itu, untuk mengakomodir kemauan rakyat dapat dengan melakukan aksi murba atau aksi massa. Aksi massa ini harus bersatu atas tujuan atau keperluan sama yaitu menurut hak lahir dan hak bathin itu sendiri, juga dipimpin oleh seseorang yang mempunyai kecakapan memimpin; mengerti keadaan; kemauan baja dan sumber atau teori terus mengalir dari pemimpin tersebut.

Pemikiran Tan Malaka tentang politik ini, menjelaskan kemerdekaan yang seharusnya dirasakan oleh rakyat Indonesia. “Kemerdekaan manusia itu mengandung ‘perdamaian’ buat seluruh manusia. Perdamaian itulah dasar kemakmuran. Akhirnya kemakmuran itulah yang menjadi dasar kemerdekaan” (Tan Malaka, 2014:112). Tan Malaka menyimpulkan tentang pemikiran politiknya itu adalah pentingnya akan kemerdekaan 100% yang menjadi satu jaminan agar Indonesia tetap merdeka dan kemakmuran rakyatnya tidak terganggu serta dapat mengadakan suatu industri nasional.

Pertemuan awal antara kedua tokoh ini memang sudah nampak jelas bahwa perbedaan ideologi yang dianutpun membawa dampak terhadap strategi politik yang akan dilakukan. Saat Tan Malaka di Bogor kembali bertemu dengan para pemuda teman seperjuangannya terutama Sukarni dan Adam Malik. Keberadaannya di Bogor dapat mempertemukannya dengan para pemuda, barulah besok harinya Sutan Sjahrir juga datang menemui Tan Malaka. Tan Malaka, Sutan Sjahrir dan para pemuda sempat berjanji untuk bertemu lagi “Karena saya hendak berangkat ke Banten, maka kami berjanji akan bertemu kembali di Banten, ialah pada permulaan bulan Oktober juga” (Tan Malaka, 2000:177).

Pertemuan di Serang Banten dengan para pemuda dan Sutan Sjahrir tentunya membicarakan mengenai keadaan Republik Indonesia saat itu, serta tentang akan membentuknya suatu Partai Sosialis dan Tan Malaka diminta untuk menjadi ketua Partai itu. Mengenai pembicaraan terkait kondisi Republik, Tan Malaka menjelaskan bahwa sudah jelas kalau Inggris berutang budi kepada Belanda dan akan melakukan kerja sama dengan kaum moderat Indonesia.

Tentang untuk pembentukan Partai Sosialis yang akan didirikan di Jogja, Tan Malaka menolak karena pada masa revolusi tidak tepat kalau untuk pendirian Partai karena akan membuat tumbuhnya partai-partai lain dan akan sulit untuk mempersatukan kekuatan massa. Serta saat pembicaraan di Serang Banten itu Tan Malaka juga mengatakan :

“Jadi permintaan mengetuai Parta Sosialis itu bermula sudah saya tolak di Serang. Apabila salah seorang pemuda yang hadir menanyakan kepada Sutan Syahrir, apakah dia akan pergi ke Yogya buat mendirikan Partai Sosialis, maka dia tiada memberi jawaban apa-apa. Sepatah kata pun Sutan Syahrir tiada berbicara pada malam hari itu” (Tan Malaka, 2000:179).

Nampak jelas dimana saat pertemuan awal kedua tokoh ini Sjahrir yang lebih menganut ideologi sosialis demokratis lebih menginginkan pembentukan partai, tetapi Tan Malaka lebih kepada persatuan dari seluruh rakyat atau pemuda pada masa itu.

4.2 Surat Wasiat Sukarno-Hatta

Suatu peristiwa atau konstelasi politik yang juga membahas mengenai Suatan Sjahrir dan Tan Malaka yaitu mengenai surat wasiat Sukarno – Hatta atau biasa dikenal dengan “Testamen Politik” Sukarno kepada Tan Malaka. Suatu perilaku politik dari Sukarno-Hatta yang nantinya menandatangani surat wasiat ini ada tanggal 1 Oktober 1945.

Testamen politik kepada Tan Malaka murni inisiatif dari Presiden Sukarno, karena kondisi Indonesia pada saat itu begitu genting. Situasi tersebut akibat adanya desas-desus bahwa kedatangan kembali sekutu kembali dan akan menangkap serta membunuh Sukarno-Hatta. Percobaan pembunuhan pun sempat dilancarkan oleh pihak sekutu. Keadaan yang semacam ini, membuat Sukarno memprakarsai strategi testamen politik tersebut, untuk menanggulangi bilamana nantinya benar-benar terjadi sesuatu terhadap Sukarno-Hatta dan tidak lagi dapat menjalankan kepemimpinannya.

Tan Malaka yang menjadi keinginan Sukarno untuk menggantikannya memang tidak nampak jelas sebagai seorang tokoh yang ikut andil dalam masa

perjuangan kemerdekaan karena Tan Malaka dibuang oleh pihak kolonial Belanda. Akan tetapi Subardjo yang dekat dengan Tan Malaka, memperkenalkan Tan Malaka kepada kawan-kawannya. Kunjungan Tan Malaka kepada Subardjo pada tanggal 25 Agustus 1945 membuatnya dikenal oleh beberapa tokoh seperti Soekarno, Mohammad Hatta, Sjahrir, Iwa Kusumsumantri, Buntaran Martoadmodjo dan tokoh pejuang yang lain (Subardjo, 1978:362). Perkenalan ini membuat Tan Malaka dapat kembali dalam panggung politik Nasional.

Tanggal 9 September Tan Malaka kembali bertemu dengan Sukarno, Sayuti Melik yang mempertemukan kembali kedua tokoh ini. Pertemuan ini sangat rahasia karena Indonesia masih dalam pantau penjajah. Maka Sukarno merasa perlu untuk bertemu dengan seorang tokoh revolusioner dan pencetus konsep Republik tersebut. Sukarno dan Tan Malaka membicarakan mengenai konsep-konsep dari pemikiran Tan Malaka. Setelah mendengar penjelasan dari Tan Malaka, membuat pemimpin besar revolusi itu terpesona. Akhirnya karena terbayang suasana yang menjadi kekhawatirannya serta merta Sukarno berkata kepada Tan Malaka, “Apabila ia harus tersingkir, maka Tan Malaka harus tampil sebagai penggantinya” (Poeze, 2008:57). Pertemuan antara Sukarno dan Tan Malaka untuk kedua kalinya kembali Sayuti Melik menjadi perantaranya. Sukarno kembali mengulangi janjinya menunjuk Tan Malaka sebagai penggantinya.

Tan Malaka berpikir pernyataan Sukarno semacam itu hanya untuk penghargaan terhadap pemikiran serta pertemanan secara politik. Pertemuan tersebut diceritakan Tan Malaka kepada Subardjo. Subardjo sangat setuju dengan Sukarno karena situasi genting memang harus segera melakukan tindakan. Lalu Subardjo atas nama Tan Malaka menemui Sukarno untuk membuat surat sebagai tanda legal pergantian pimpinan revolusi tersebut. Lalu pada tanggal 30 September pertemuan antara Subardjo, Sukarno dan Tan Malaka disaksikan oleh Iwa Kusumasumantri, Gatot Tarumamihardjo untuk penyusunan surat wasiat tersebut yang nantinya akan ditandatangani oleh Sukarno-Hatta.

Setelah penulisan surat wasiat tersebut, Sukarno dan Suabrdjo langsung menuju Hatta agar membacanya. Akhirnya Hatta memberikan pernyataan bahwa :

“... Ia mengatakan menolak membubuhkan tandatangannya. Juga Hatta menawarkan jalan keluar: penunjukan pada empat pengganti dari empat aliran besar itu dia bisa terima. Tan Malaka mewakili aliran paling kiri, Sjahrir untuk kiri tengah, Wongsonegoro wakil kanan dan golongan feodal, dan Soekiman untuk islam.”(Poeze, 2008:59).

Setelah pernyataan Hatta tersebut, pertemuan akan dilaksanakan kembali besok harinya di rumah Subardjo. Tan Malaka dan Iwa Kusumasumantri yang juga berada disana menyambut kedatangan Sukarno dan Hatta, Hatta pun memaparkan ide-idenya tersebut. Hingga akhirnya, naskah testamen politik disetujui dan diketik oleh Subardjo (lihat lampiran B). Subardjo membuat salinan testamen politik tersebut rangkap tiga yang kemudian ditandatangani oleh Presiden Soekarno dan wakil Presiden Mohammad Hatta.

Mengenai Sjahrir dan Wongsonegoro yang tidak hadir dalam pertemuan tanggal 1 Oktober tersebut, akhirnya Subardjo ditugasi untuk memberikan surat wasiat testamen politik tersebut kepada kedua tokoh tersebut. Akan tetapi, Sjahrir dan Wongsonegoro tidak mengetahui tentang adanya testamen politik tersebut, saat Hatta menemui dan menanyakan tentang surat wasiat itu. Sehingga Hatta mencurigai Subardjo yang tidak melaksanakan tugasnya untuk memberikan surat wasiat tersebut.

Perkembangan selanjutnya mengenai tugas yang harus dilaksanakan Subardjo untuk menyampaikan surat wasiat kepada Sjahrir dan Wongsonegoro. Subardjo sadar bahwa telah menjadi tugasnya, tetapi “suasana tidak aman karena revolusi, hubungan pers, lalu lintas dan peristiwa lain-lain, maka saya tidak dapat lagi menyampaikannya kepada saudara-saudara yang disebut itu” (Subardjo, 1978:364). Akan tetapi, Subardjo dan Sjahrir yang tidak dapat menyatu secara ideologi menjadi pandangan lain mengenai tidak disampaikannya salinan surat wasiat itu kepada Sjahrir. Sementara itu, Tan Malaka yang memegang salinan dari surat wasiat tersebut, melakukan perjalanan keliling Jawa. Tetapi tidak untuk menyebarkan tentang adanya surat wasiat yang telah ditandatangani oleh Sukarno-Hatta. Hingga akhirnya tentang surat wasiat tersebut menjadi suatu yang rahasia dan terjadi kesimpangsiuran mengenai adanya surat wasiat testamen politik tersebut.

Surat Wasiat testamen politik Sukarno-Hatta ini tidak pernah diketahui mengenai perjalanan kebenaran peristiwa tersebut. Setiap anggapan muncul menurut versinya masing-masing. Surat wasiat ini tidak pernah menjadi suatu yang relevan, hanya menjadi konstelasi politik pada masa revolusi. Esensi dari testamen politik tersebut yaitu berlaku jikalau hanya terjadi penangkapan terhadap Sukarno-Hatta, akan tetapi kedatangan Inggris hanya menegakkan hukum dan ketertiban berarti tidak mencampuri urusan dalam negeri Indonesia (Poeze, 2008:64).

Perkembangan surat wasiat inipun tidak pernah terjadi karena perubahan sistem pemerintahan Indonesia dari Presidensiil menjadi Parlementer pada 14 November 1945. Awalnya Presiden Sukarno yang memegang kekuasaan tertinggi pemerintahan, akhirnya jatuh kepada Sjahrir selaku Perdana Menteri. Hanya saja berawal dengan dituliskan nama kedua tokoh baik Sjahrir maupun Tan Malaka akhirnya menjadi tokoh berpengaruh dalam perkembangan revolusi mempertahankan kemerdekaan Indonesia juga mewarnai panggung politik Nasional.

BAB 5. SITUASI POLITIK PEMERINTAHAN SUTAN SJAHRIR MENGHADAPI TAN MALAKA TAHUN 1945-1947

Dinamika politik pada masa pasca proklamasi kemerdekaan, ternyata perubahan yang ada di daerah-daerah tidak dapat diikuti oleh situasi politik di pusat. Kelemahan pemerintah pusat dalam kordinasi dengan kekuatan-kekuatan pemuda yang semakin masif di daerah-daerah membuat situasi politik di pusat tidak berimbang antara dalam negeri maupun luar negeri. Situasi politik yang harus dihadapi para elit politik pusat seperti Sukarno-Hatta adalah kedatangan kembali sekutu dan tuduhan terkait kolaborator Jepang, meskipun sebenarnya para elit pemuda dan rakyat sangat mentaati perintah Bung Karno seperti dalam rapat di lapangan Ikada.

Perkembangan berikutnya terjadi dengan cepat yaitu PPKI yang diubah menjadi KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) pada 29 Agustus 1945. Tugas KNIP yaitu :

“... Mengumumkan kemauan rakyat Indonesia untuk hidup sebagai suatu bangsa merdeka; mempersatukan semua lapisan dan bidang pekerjaan supaya di mana pun seluruh Indonesia solidaritas dari kesatuan Nasional yang erat dan utuh akan tercapai; membantu menenteramkan rakyat dan turut melindungi keamanan umum; membantu para pemimpin untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia dan di daerah-daerah membantu pemerintahan setempat untuk meningkatkan kesejahteraan umum. ...” (Anderson, 1988:138).

Pada awal bulan Oktober 1945 muncul semacam kesepakatan diantara pemuda yang sadar politik tersebut agar kelemahan yang mereka pandang dari pemerintahan Sukarno-Hatta harus dihentikan. “Orang yang melangkah maju dalam keadaan yang genting ini untuk menyuarakan ketidakpuasan umum itu dan untuk memberikan kepemimpinan kepada tekanan-tekanan pemuda supaya menciptakan suatu perubahan adalah Sutan Sjahrir” (Anderson, 1988:198). Munculnya Sutan Sjahrir merupakan suatu hal yang tepat untuk menghadapi hal yang genting tersebut. Serang tokoh yang dikenal baik oleh para elit politik tua, serta usia yang tak terlampau dari para pemuda hingga sebutan kolaborator Jepang yang tidak terdapat padanya.

Sutan Sjahrir mulai terpikirkan bahwa kejatuhan PNI yang telah digantikan oleh KNIP dan pengaruh nama baiknya terhadap kebanyakan para pemuda perwakilan dalam KNIP, sehingga Sutan Sjahrir secara terbuka ingin membuat KNIP sebagai suatu pemerintahan tertinggi yang sudah diatur dalam undang-undang pasal 4 aturan peralihan. Lalu pada tanggal 7 Oktober Sjahrir membuat 50 anggota KNIP menandatangani suatu petisi yang ditujukan kepada Sukarno-Hatta. Sehingga pada pertengahan bulan Oktober, Hatta secara tidak resmi membacakan pidato pada sidang KNIP yang berbunyi :

“...Memutuskan: Bahwa Komite Nasional Pusat, sebelum terbentuknya Madjelis Permusjawaratan Rakjat dan Dewan Perwakilan Rakjat disertai kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan garis-garis besar dari pada haluan Negara, serta menyetujui bahwa pekerjaan Komite Nasional Pusat sehari-hari berhubung dengan gentingnya keadaan dijalankan oleh sebuah Badan Pekerja yang dipilih diantara mereka dan yang bertanggung jawab kepada Komite Nasional Pusat.” (Anderson, 1988:201).

Petisi yang telah disetujui oleh Hatta tersebut dengan keluarnya maklumat atau dekrit itu, membuat KNIP dilimpahi kekuasaan legislatif. Sehingga hal tersebut berarti bahwa segala undang-undang harus disetujui oleh KNIP maupun Presiden. Sesuai dengan permintaan KNIP, dekrit Presiden itu memutuskan bahwa KNIP dapat mendelegasikan kekuasaannya kepada badan perwakilan kecil yang sifatnya permanen yaitu Badan Pekerja. Kemudian KNIP memilih Sjahrir dan Sjarifuddin sebagai ketua dan wakil Badan Pekerja, adapun beberapa anggota yaitu :

“... Sesudah itu Sjahrir dan Amir mengemukakan daftar Badan Pekerja yang beranggotakan 15 orang: ketua, Sutan Sjahrir; wakil ketua, Amir Sjarifuddin, S.H.; sekretaris, R. Soewandi, S.H.; anggota-anggota, R. Sjafruddin Prawiranegara, A. Wachid Hasjim, R. Hindromartono, S.H., R.M. Sunario Kolopaking, S.H., dr. Abdul Halim, Subadio Sastrosatomo, Tan Ling Djie, Supeno, Sarmidi Mangunsarkoro, Adam Malik, Tadjuludin, dan dr. Sudarsono.” (Anderson, 1998:203).

5.1 Kabinet Sjahrir I dan Persatuan Perjuangan

Badan Pekerja menjadi pusat dalam pemerintah, tidak hanya membuat banyak sekali perubahan dalam sistem pemerintahan. Tetapi juga membuat keseimbangan dalam kekuasaan politik. Tanggal 20 Oktober 1945 Badan Pekerja ini mengeluarkan suatu penjelasan perihal kedudukannya untuk menghindari kesalahpahaman atas status dan fungsi Badan Pekerja. Penjelasan tersebut merupakan penafsiran dari maklumat atau dekrit yang dikeluarkan oleh Hatta, penjelasan tersebut yaitu :

- “a) Turut menetapkan garis-garis besar haluan negara. Ini berarti, bahwa Badan Pekerja, bersama-sama dengan Presiden, menetapkan garis-garis besar haluan Negara. Badan Pekerja tidak berhak ikut campur dalam kebijaksanaan (*dagelijks beleid*) pemerintah sehari-hari. Ini tetap di tangan Presiden semata-mata.
- b) Menetapkan bersama-sama dengan Presiden undang-undang yang boleh mengenai segala macam urusan pemerintahan. Yang menjalankan undang-undang ini adalah pemerintah, artinya: Presiden dibantu oleh menteri-menteri pegawai-pegawai yang dibawahnya.” (Kahin, 2013:221).

5.1.1 Kabinet Sjahrir I

Mengenai Sutan Sjahrir yang menjadi ketua BP-KNIP ini memang sudah dituntut oleh ideologinya dan keadaan-keadaan politik untuk mendesak disahkannya hak politik partai-partai atau dalam artian pembentukan sistem multipartai. Tetapi akibat langsung dari pengumuman itu terbatas ke Jakarta, dengan membantu mengalihkan kekuasaan dari kabinet Sukarno kepada Badan Pekerja. Sedangkan keadaan di daerah-daerah sudah mulai bermunculan partai-partai meskipun tanpa persetujuan di pusat, sehingga pengumuman mengenai pembentukan partai-partai tersebut bukan merupakan pemberian hak melainkan hanya pengakuan terhadap realitas yang ada (Anderson, 1988:205).

BP-KNIP yang telah diketuai oleh Sutan Sjahrir pada tanggal 1 November mengumumkan bahwa telah mendesak Presiden Sukarno untuk mengalihkan tanggung jawab menteri kepada badan legislatif. Sebenarnya Presiden telah setuju terhadap perubahan tersebut, berdasarkan pasal 4 aturan peralihan UUD. Maka dari itu, BP-KNIP telah mempercayakan pembentukan kabinet baru kepada ketua

dan wakil Badan Pekerja itu sendiri. Pada tanggal 14 November diumumkanlah terbentuknya kabinet Sjahrir pertama (lihat lampiran B).

Pembentukan kabinet pertama Sjahrir ini pada tanggal 17 November 1945 langsung memberikan pernyataan mengenai strategi perjuangannya, bahwa mengenai perjuangan luar negeri kabinet akan tetap memperjuangkan kemerdekaan Indonesia untuk dapat diakui dalam dunia Internasional berdasarkan Maklumat Pemerintah tanggal 1 November 1945. Berkenaan dengan politik dalam negeri kabinet akan memperhatikan hal-hal berikut:

- “1). Menjempoernakan soesoenan Pemerintah Daerah berdasarkan kedaulatan rakjat;
- 2). Mentjapai coordinasi segala tenaga rakjat didalam oesaha menegakkan Negara Repoeblik Indonesia serta pembangoenan masjarakat jang berdasarkan keadilan dan perikemanusiaan;
- 3). Beroesaha oentuk memperbaiki kemakmoeran rakjat, diantaranya dengan djalan pembagian makanan;
- 4). Beroesaha mempertjepat keberesan tentang hal Oeang Repoeblik Indonesia”(Anderson, 1988:229).

Beragam anggapan muncul dalam koran-koran maupun pers mengenai pembentukan kabinet Sjahrir 1 ini. Tulisan-tulisan dalam pers tersebut mengecam susunan kabinet Sjahrir tersebut. Tokoh organisasi Islam masjumi mengatakan bahwa hal tersebut menyalahi UUD 1945. Serta beberapa tokoh pemuda yang juga mengkritik tentang susunan kabinet tersebut. Memang susunan kabinet Sjahrir dan Amir Sjarifuddin dikatakan banyak kawan-kawan dari kedua tokoh tersebut. Serta anggota dalam kabinet tersebut tidak ada tokoh pemuda dan juga banyak yang juga merupakan kolaborator Jepang juga dikatakan berbau Belanda karena pernah menjadi pejabat saat Belanda berkuasa (Hilmi, 2009:58-59).

Kabinet Sjahrir ini memang sampai batas-batas tertentu terdiri dari kawan-kawan lama dari Sutan Sjahrir dan Amir. “Sunario, Darmasetiawan, Soewandi, dan Abdul Karim adalah konco-konco pribadi Sjahrir; Moelia adalah sepupu Amir” (Anderson, 1988:228). Mengenai pemuda, mungkin Sukarno-Hatta tidak menginginkan para pemuda untuk ikut campurtangan terhadap pembentukan

kabinet tersebut. Tetapi dalam *Perjuangan Kita* sangat jelas bahwa Sjahrir sendiri tidak ingin ada unsur pemuda. Maka dari itu Sjahrir memberikan kebebasan kepada dirinya untuk bertindak secara maksimal dalam pembentukan pemerintahan itu untuk kelangsungan hidup berpolitiknya.

Selanjutnya Sutan Sjahrir pada pertengahan bulan November memberikan himbauan bahwa semua kekuatan bersenjata Republik Indonesia untuk keluar dari Ibu Kota Jakarta. Perintah tersebut agar Ibu Kota Jakarta menjadi tenang untuk terlaksananya perundingan dengan sekutu. Akan tetapi hal tersebut menjadikan pihak sekutu bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat Indonesia. Tempat-tempat strategis di Jakarta juga dikuasai oleh sekutu, serta distribusi bahan pangan pun terhambat. Tentara sekutu Inggris dan Belanda telah melakukan pembersihan di Ibu Kota Jakarta tersebut.

Meskipun telah terjadi pemberontakan dari tentara sekutu, namun pemerintah tidak mengubah perjuangan politik yang damai dan diplomasi sesuai dengan maklumat Presiden 1 November 1945. Namun situasi yang tidak nyaman tersebut membuat pemerintah memindahkan pemerintahan pusat dari Ibu Kota Jakarta ke Jogjakarta. Tetapi Sutan Sjahrir tidak pindah, hanya saja setiap akhir pekan pergi ke Jogjakarta untuk melakukan sidang kabinet. Hal tersebut dilakukannya untuk menjaga hubungan diplomasi dengan sekutu yang masih berada di Jakarta (Hilmi, 2009:61-62).

5.1.2 Persatuan Perjuangan

Kabinet Sjahrir I sejak pembentukannya memang telah ada kekuatan oposisi yang menentang. Pertama, mengenai komposisi susunan kabinet merupakan tokoh-tokoh dari partai sosialis dan juga dapat dikatakan buta politik. kedua, mengenai program kabinet yang mengutamakan diplomasi daripada perlawanan bersenjata dalam artian ingin mempercepat pembicaraan-pembicaraan dengan Belanda. Selain itu, juga konflik dengan tentara yang membuat para tentara ini lebih memilih keberpihakan pada golongan-golongan yang menentang kabinet tersebut. Para golongan organisasi pemuda pun demikian, beranggapan

bahwa Sjahrir dan anggota kabinetnya merasa takut kepada pemuda sama halnya takut terhadap sekutu dan Belanda (Anderson, 1988:298).

Perkembangan organisasi-organisasi yang menentang kabinet Sjahrir ini membuat pemerintahannya semakin melemah. Bagi organisasi penentang ini hanya diperlukan seorang tokoh dan juga program yang memfokuskan pada pertentangan itu sendiri untuk mempercepat krisis pemerintahan tersebut. “Orang yang tampil untuk mengisi peranan ini adalah Tan Malaka, seorang tokoh yang telah menjadi dongeng dan penuh teka-teki” (Anderson, 1988:299).

Tan Malaka yang semasa hidupnya sejak kembali ke-Indonesia sudah berada di tempat terpencil yaitu bayah. Tempat terpencil tersebut membuat Tan Malaka melihat langsung kehidupan pertambangan batubara tersebut. maka dari itu Tan Malaka tidak seperti para elit politik Ibu Kota Jakarta yang betapa susahnyanya memilih antara berkerjasama dengan Jepang atau tidak. Sedikit sekali para pemuda intelek Jakarta yang mengenalnya, karena Tan Malaka tidak tergolong dalam gerakan bawah tanah. Demikian mengenai soal kolaborator Jepang, Tan Malaka juga tidak pernah ikut andil dalam kerjasama dengan Jepang. “Selain itu, jarak dan keterpencilan nampaknya telah memberikan kepadanya suatu perspektif yang sukar untuk dicapai di kota besar itu: yaitu perspektif bahwa hubungan-hubungan dengan Jepang yang kalah adalah jauh kurang penting daripada hubungan-hubungan yang akan datang dengan Belanda, dan dibelakang mereka, kekuatan-kekuatan Anglo-Saxon” (Anderson, 1988:307).

Pembentukan suatu organisasi atau partai pada masa itu tidak pernah sedikitpun terpikirkan oleh Tan Malaka, apalagi untuk memimpin suatu golongan tertentu. Tetapi mengingat beberapa hal pada masa itu, yaitu:

“Mengingat (1), pertentangan antara kemauan dan tindakan kepala negara dengan kemauan dan tindakan rakyat/pemuda di mana-mana; mengingat (2), Pertentangan dan permusuhan antara partai (Islam contra Sosialis di Pekalongan, Cirebon dan Priangan); mengingat (3), permusuhan antara pasukan dan pasukan seperti sudah terbukti di Surabaya (tembak-menembak dari belakang); mengingat (4), Sikap dan tindakan Inggris yang mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesiadan dengan senjata memaksakan kedaulatan Belanda atas bangsa Indonesia, yang sudah memproklamirkan kemerdekaan itu; mengingat (5),

Akhirnya kedatangan Van Mook dengan Usul Gemeene-best dan Rijksverband-nya, cocok dengan pidato Wilhelmina pada bulan Desember 1942” (Tan Malaka, 2000:183).

Hingga akhirnya dengan beberapa hal tersebut mengharuskan Tan Malaka untuk mengambil keputusan pembentukan suatu fusi atau federasi dalam menyatukan semua golongan yang terikat pada satu program. Maksudnya yaitu menyatu dalam kepentingan bersama dan bekerja sama untuk kemerdekaan 100%. “Baik juga dicatat di sini dari pidato wakil Tentara Republik (T.K.R.) yakni Panglima Besar Sudirman sendiri, di Kongres Mojokerto, pidato mana sangat menggembirakan dan menggemparkan para hadirin yang berbunyi : “Lebih baik kita diatom daripada merdeka kurang dari 100%”” (Tan Malaka, 2000:188).

Terbentuknya Persatuan Perjuangan pun yang pada mulanya konferensi mendirikannya akan dilaksanakan di Malang pada bulan Desember, akan tetapi karena tidak memungkinkan para wakil ini untuk sempat di Malang dan perwakilan kebanyakan dari Jawa Barat maka pelaksanaan tersebut diundur. Tan Malaka akhirnya berangkat ke Cirebon untuk menemui para perwakilan tersebut. Hingga pada tanggal 3-5 Januari Kongres pertama dilaksanakan di Purwokerto yang dihadiri 132 organisasi baik organisasi politik maupun ketentaraan.

Tanggal 15-16 Januari 1946 dilaksanakan kembali kongres kedua dari Persatuan Perjuangan, pada kongres ini kehadiran anggota bertambah menjadi 141 organisasi. Pelaksanaan dua kali kongres ini, tetap dikirimkan surat undangan terhadap Presiden dan Wakil Presiden serta para Menteri. “Tetapi yang datang cuma bekas Menteri Luar Negeri Mr. Subardjo, bekas Jaksa Agung, Mr. Gatot dan Panglima Besar Sudirman, kepada dua KONGRES di Solo, S.P. Sultan Jogja dan S.P. Susuhunan Solo mengirimkan wakil” (Tan Malaka, 2000:187-188). Kongres pertama di Mojokerto Tan Malaka usulan Program dan pada kongres kedua di Solo dihasilkanlah beberapa putusan untuk Persatuan Perjuangan, dimana nama tersebut yang telah disepakati (lihat lampiran C).

Kongres Persatuan Perjuangan (PP) tersebut menghasilkan “*MINIMUM PROGRAM*” yang terdapat 7 pasal dimana hal tersebutlah paling menonjol dari PP terhadap pertentangannya kepada pemerintahan kabinet Sjahrir. Program

tersebut merupakan suatu tuntutan terhadap program yang akan dilaksanakan pemerintahan. Pasal-pasal tersebut yaitu :

- “... 1. BERUNDING ATAS PENGAKUAN KEMERDEKAAN 100%
2. PEMERINTAHAN RAKYAT (dalam ARTI SESUAINYA HALUAN PEMERINTAH DENGAN KEMAUAN RAKYAT.
3. TENTARA RAKYAT (dalam ARTI SESUAINYA HALUAN TENTARA DENGAN KEMAUAN RAKYAT)
4. MELUCUTI TENTARA JEPANG.
5. MENGRURUS TAWANAN BANGSA EROPA.
6. MENYITA (MEMBESLAG) dan MENYELENGGARAKAN PERTANIAN MUSUH (KEBUN).
7. MENYITA (MEMBESLAG) dan MENYELENGGARAKAN PERINDUSTRIAN MUSUH (PABRIK, BENGKEL, TAMBANG DLL)” (Tan Malaka, 2000:194).

Makna tentang pasal 1 menurut PP jangan sampai kurang terhadap bunyi pasal tersebut karena hal tersebut sudah tercermin pada proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kalau hal tersebut tidak terlaksana maka telah melanggar kemerdekaan dan kemauan serta pengorbanan rakyat Indonesia itu sendiri. Pasal 2-3 adalah kemauan rakyat agar tidak kembali menyimpang dari pemerintah, maka gerakan revolusioner harus pada satu pemerintahan rakyat dan satu tentara rakyat. Mengenai pasal 5-6 PP mengharuskan sekali bahwa rakyatlah yang harus melucuti tentara Jepang agar supaya rakyat dapat mempertahankan diri dari serangan Inggris. Pasal 6 dan 7 PP menjelaskan bahwa hal tersebut tidak melanggar undang-undang perang, Inggris dan Belanda yang datang kembali untuk menguasai Indonesia maka wajib disita untuk keperluan rakyat dalam menghadapi peperangan (Tan Malaka, 2000:195-197).

Tan Malaka yang mengusulkan Minimum Program tersebut dan telah disepakati para anggota PP sebenarnya bermaksud untuk tercapainya persatuan bukan hanya antara partai dengan partai, tetapi terpenting adalah persatuan antara PP juga pemerintah. Meskipun demikian, Tan Malaka yang tidak menyebutkan dengan jelas program pemerintahan Sutan Sjahrir ternyata menimbulkan kondisi yang berbeda antara PP dengan pemerintah.

Minimum Program pada pasal 2-4 tidak terlalu menunjukkan suatu konflik yang sangat hebat antara pemerintah dan oposisi. Pasal-pasal lainlah seperti pasal 1 yang menentang pemerintah dalam kebijakan berdamai dengan Inggris serta untuk memperoleh dukungan dalam perundingan-perundingan terhadap Belanda. pasal 5, 6 dan 7 merupakan bantahan langsung terhadap politik kabinet Sjahrir yang tidak akan menyandera ataupun menyita harta benda dari sekutu Inggris maupun Belanda.

Pemimpin Partai Sosialis yang berada dalam kabinet segera mengerti akan tantangan dari PP. Kemudian melalui Partai Sosialis, pemerintah mengajukan suatu surat yang berisi tentang suatu penggabungan Barisan Nasional dengan program bersama. Semua organisasi mempunyai hak suara untuk menyelesaikan perbedaan pendapat dengan cara persaudaraan. “Program politik yang diusulkan itu akan meluaskan demokrasi dalam negeri dan mempertahankan kemerdekaan ke luar; program ekonomi akan bermaksud meningkatkan produksi dan distribusi barang-barang dan memajukan upaya-upaya pendidikan” (Anderson, 1988:322).

Surat dari Partai Sosialis tersebut tidak pernah berjalan dengan kehendak pemerintah, maka pemerintah mencari jalan lain untuk menjatuhkan penentangan dari pihak oposisi PP. Maka para pemimpin dalam kabinet memakai cara untuk memasukkan suatu perwakilan kedalam PP, hal tersebut dilakukan karena begitu sulitnya untuk menggagalkan program pihak oposisi. Perwakilan pemerintah yang sengaja dimasukkan dengan harapan dapat menguasai organisasi tersebut dan menghancurkan dari dalam.

Popularitas pihak oposisi pemerintah yaitu PP terus tumbuh, dan cara-cara penentangan dari pemerintah tidak menghasilkan suatu perubahan. Hingga Sayuti Melik menuliskan sebuah artikel dalam “*Kedaulatan Rakjat*”, yaitu :

“... Minimum Program itu sebenarnya adalah tanggung jawab pemerintah; penduduk pada umumnya hanya dapat membantu. Ia memperingatkan bahwa jika pemerintah tidak menerima tanggung jawab ini PP akan gagal, karena PP sendiri tidak dapat melaksanakan hal-hal penting dalam program itu” (Anderson, 1988:325).

5.2 Kabinet Sjahrir II dan Peristiwa 3 Juli

Pada pertengahan Februari tekanan terhadap kabinet Sjahrir I semakin keras. Persatuan Perjuangan sebagai oposisi meminta pemerintah tegas terhadap kabinet Sjahrir. Politik PP ini sebenarnya sudah terbaca karena pihak oposisi mengharapkan adanya kesatuan nasional yaitu komposisi kabinet yang terwakilkan semua golongan didalamnya. Akan tetapi, para pemimpin ini menyebutkan bahwa tidak boleh ada anggotanya masuk dalam kabinet sebelum minimum program dilaksanakan oleh pemerintah. Maka PP ini hanya ingin menjatuhkan kabinet Sjahrir.

Tekanan PP ini tidak dapat diabaikan lagi oleh KNIP maupun Sukarno yang sangat menginginkan untuk pembubaran kabinet Sjahrir I. Akhirnya pada tanggal 28 Februari 1946 Sutan Sjahrir secara tiba-tiba mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri. Memang secara tidak langsung tuntutan dari para pemimpin PP seakan berhasil. Tetapi akibat kemunduran Sutan Sjahrir ini, Sukarno memberi mandat kepada PP untuk pembentukan suatu kabinet koalisi yang bersifat nasional. Mandat yang diberikan Sukarno pada para pemimpin PP tidak dapat dilaksanakan oleh PP karena kebanyakan dari pemimpin PP berbeda pendapat mengenai posisi pada susunan kabinet. Ketidakmampuan melaksanakan mandat dari Sukarno ini, membuat Sukarno meminta Sjahrir kembali membentuk kabinet baru dan KNIP pun menyetujui tindakan Sukarno tersebut (Kahin, 2013:248-250).

5.2.1 Kabinet Sjahrir II

Pembentukan kabinet kedua Sjahrir ini, KNIP memintanya untuk lebih bersifat nasional atau mewakili semua golongan. Sutan Sjahrir akan menerima permintaan untuk pembentukan kabinet kedua ini asalkan pemilihan anggota kabinet kembali berada ditangannya. Akhirnya pun terbentuk kabinet Sjahrir II pada 13 Maret 1946. (lihat lampiran D).

Kabinet Sjahrir II ini terdapat pula jabatan menteri muda, seperti Agus Salim, Samadikun, Leimina, Syarifuddin Prawiranegara, Samsu Harya Udaya, Saksono, Aruji Kartawinata, Hadi, T.G.S Moelia, Abdul Madjid Djojohadiningrat, Juanda dan Laoh (Hilmi, 2009:74). Selain jabatan menteri muda ada juga

tambahan dalam kabinet, “Kementerian Pertanian yang diberikan kepada Mr. Rasat dari PNI, dan kementerian tanpa portofolio diberikan kepada Wikana dari Pesindo. ...” (Kahin, 2013:251).

Kabinet Sjahrir II ini sebenarnya masih dapat penentangan dari PP, karena pemilihan anggota kabinet kembali didominasi oleh kelompok Sutan Sjahrir. Namun, pada sidang KNIP yang dilaksanakan pada 28 Februari-2 Maret 1946 kabinet ini diberi mandat yang jelas. Mandat tersebut mengarah pada kekuasaan kabinet yang menyamai badan legislatif dimana seharusnya kedudukan tersebut adalah Badan Pekerja. Mandat yang diberikan meliputi:

“...(1) mengadakan perundingan dengan penguasa Belanda atas dasar kedaulatan Republik Indonesia; (2) menyiapkan pertahanan bagi Republik Indonesia; (3) membentuk pemerintahan pusat dan tingkat Provinsi atas dasar demokrasi; (4) mengadakan pengadaan produksi secara maksimum dan pendistribusian barang-barang secara adil; (5) mengelola perkebunan dan industri-industri penting dibawah pengawasan pemerintah” (Kahin, 2013:251).

Pembentukan kabinet baru ini yang kembali dipimpin oleh Sutan Sjahrir, meskipun mendapat penentangan dari pihak oposisi tetap saja kabinet tersebut melanjutkan kebijakan diplomasinya dengan Belanda. perundingan yang dilakukan oleh pemerintahan kabinet yaitu pertemuan dengan Belanda di Jakarta. Persetujuan atau perundingan tersebut kemudian disebut dengan *Batavia Concept*. “Bagian penting dari kesepakatan itu ialah pengakuan *de facto* Indonesia atas Jawa, Sumatra lalu kesepakatan kedua belah pihak untuk duduk sebagai mitra sejajar didalam struktur federal dalam masa peralihan” (Hilmi, 2009:71).

Pertemuan yang dilakukan di Jakarta juga menghasilkan persetujuan bahwa pertemuan selanjutnya antara Indonesia dan Belanda, dilaksanakan di Belanda dan Hoge Valuwe merupakan tempat yang tepat untuk melakukan pertemuan tersebut. Perundingan yang terlaksana di Hoge Valuwe Belanda menyimpang dari persetujuan Jakarta, Belanda kembali mengajukan gagasan yang disebut protokol 14 April 1946. Tetapi delegasi dari Indonesia tentu saja menolak protokol tersebut dan ingin perjanjian dilanjutkan sesuai dengan rumusan Jakarta, Belanda tetap pada pendiriannya agar pertemuan kedua belah pihak mengikuti

protokol Belanda. Hingga akhirnya, perundingan tersebut tidak menemukan kesepakatan, hingga wakil delegasi Indonesia mengatakan bahwa perundingan Hoge Voluwe telah gagal. Pernyataan delegasi Indonesia tersebut telah berdampak besar pada posisi Sjahrir sebagai perdana menteri. Pihak oposisi PP kembali mengecam dengan keras bahwa perundingan di Hoge Valuwe sama sekali tidak memperjuangkan kemerdekaan 100% (Hilmi, 2009:72-73).

Penentangan dari PP pada kabinet Sjahrir II nampak saat pihak oposisi ini mengadakan rapat raksasa tanggal 15 Maret 1946 di Madiun. Rapat ini membahas mengenai kebijakan diplomasi dari pemerintah. Persatuan Perjuangan ini sangat jelas menentang perjuangan diplomasi dan lebih mengarah kepada kebijakan perang. Meskipun rapat atau kongres ini tidak dihadiri sebanyak dari sebelumnya, karena golongan sosialis yang mundur. Tetapi tetap saja ingin untuk melaksanakan pawai besar antara lain untuk menentang kebijakan pemerintah tersebut.

Rapat raksasa atau kongres yang dilakukan PP tersebut merupakan kesepakatan untuk tetap menolak terbentuknya kabinet Sjahrir II begitupun dengan program-program pemerintah tersebut. Tetapi pemerintah tidak tinggal diam dengan hasil rapat raksasa pihak oposisi. “Pada 17 Maret 1946, pasukan pemerintah di Madiun menangkap dan memenjarakan Tan Malaka beserta enam pemimpin penting dari PP, yaitu Abikusno Tjokrosujoso, Chairul Saleh, Sukarni, Suprpto, Mohammad Yamin dan Wondoamiseno” (Kahin, 2013:252).

Penangkapan berawal dari pembicaraan antara Perdana Menteri Sjahrir dengan Aboe Bakar Loebis. Sjahrir merasa sulit untuk melanjutkan perundingan dengan Belanda apabila ada penentangan keras dari pihak oposisi dan daerah pedalaman yang juga melakukan pemberontakan. Kemudian Aboe Bakar Loebis pergi ke Jogjakarta menemui para menteri seperti menteri dalam negeri Sudarsono dan juga menteri pertahanan Amir Sjarifuddin untuk melakukan perundingan, hingga akhirnya memutuskan untuk menangkap Tan Malaka dan para pemimpin PP lainnya. Surat penangkapan telah ditandatangani oleh kedua menteri tersebut.

Sebelum dilakukan penangkapan Tan Malaka ditemui oleh beberapa orang Masyumi. Atas ijin penguasa Madiun, rombongan Tan Malaka dengan beberapa

orang Masyumi tersebut menuju Jogjakarta untuk bertemu Presiden agar dapat melakukan perundingan. Namun di tengah perjalanan, mobil rombongan Tan Malaka dan Sukarni berpisah dengan rombongan Masyumi. Saat itulah dilakukan penangkapan lalu disekap di sebuah rumah yang didalam telah ada Mohammad Yamin juga Abikusno. Saat menjadi tahanan politik tersebut Tan Malaka dan kawan-kawannya sering dipindah dari tempat satu ke tempat lain. Perpindahan Tan Malaka dan kawan-kawannya dengan alasan dipertemukan pada Jenderal Sudirman. Hingga akhirnya Tan Malaka serta tahanan politik yang lain kembali dipindah ke Madiun pada November 1947 (Budyawan, 2008:83-84).

Ketika Tan Malaka berada di tahanan, tokoh pemimpin PP ini masih sempat bertemu kawan-kawannya di PP. Percobaan pembunuhan juga sering dialami oleh Tan Malaka, akan tetapi percobaan itu gagal dikarenakan terhalang oleh pasukan tentara yang pro Tan Malaka dan PP. Saat keberadaannya ditahanan Tan Malaka juga mendengar pengumuman pemerintah bahwa telah terjadi kudeta yang dilakukan oleh Tan Malaka dan kawan-kawan pada tanggal 3 Juli 1946. Penangkapan Tan Malaka inipun mendapat protes dari PP, lalu pihak oposisi pemerintah tersebut mengirimkan surat seputar penangkapan salah satu tokoh pimpinannya tersebut kepada Presiden dan Wakil Presiden serta kementerian.

Penangkapan Tan Malaka dan beberapa tokoh PP berdampak sangat besar terhadap pihak oposisi tersebut. Persatuan Perjuangan menjadi sedikit vakum tau tidak maksimal karena hal tersebut, meskipun ternyata jenderal Sudirman tidak ditangkap oleh pihak pemerintah. Hingga pada tanggal 3-5 Juni 1946, PP melakukan pertemuan antara anggota-anggotanya di Jogjakarta. Pertemuan tersebut dipimpin oleh ketua sementara yaitu Mangunkusumo, yang memberikan pernyataan “PP tidak relevan lagi karena telah dibentuk Konsentrasi Nasional untuk perjuangan yang lebih panjang yang juga diikuti oleh anggota-anggota PP” (Budyawan, 2008:86).

Kelemahan dalam PP membuat pemerintahan Sjahrir dapat memperlancar usahanya untuk berunding dengan Belanda. Maka pada awal bulan April berangkat beberapa delegasi ke Belanda bersama para utusan dari Belanda. Sedangkan Sjahrir berupaya tentang usulannya terhadap pengakuan secara *de*

facto dari pihak Belanda kepada Jawa, Sumatra, dan Madura sebagai bagian dari Republik Indonesia (*Kedaulatan Rakyat* dalam Budyawan, 2008:86).

Perdana Menteri Sjahrir yang berada di Jawa Timur dalam rangka meninjau salah satu kebijakannya tentang pengiriman beras dari Indonesia ke India. Setelah itu Sjahrir bergegas menuju Solo untuk beristirahat sebelum berangkat ke Jogjakarta untuk menghadiri sidang kabinet. Sutan Sjahrir dan rombongan para menterinya antara lain Menteri Dalam Negeri Sudarsono, Menteri Kemakmuran Darmawan Mangunkusumo, Jenderal Mayor Sudibyo, Sekretaris Kabinet Sumitro menginap di bekas gedung *de Javasche Bank* dengan pengamanan dari Polisi Negara (Anderson, 1988:419).

Para pemimpin tentara Republik melakukan pembicaraan serius di Jogjakarta mengenai kebijakan pemerintahan Sjahrir. Namun pertemuan tersebut tidak ada titik temu. Hingga akhirnya Mayor Yusuf meminta kepada Jenderal Sudarsono untuk menandatangani surat penangkapan terhadap Perdana Menteri Sjahrir karena dianggap mengkhianati kemerdekaan Indonesia. Para pemimpin tersebut menganggap bahwa, jika Sjahrir disingkirkan maka kepemimpinan kabinet diambil alih oleh Sukarno dan akan berubah pula kebijakan pemerintah serta mengganti susunan kabinet (Ardenson, 1988:418).

Setelah memperoleh persetujuan dari Sudarsono untuk penangkapan Sjahrir dan rombongannya, tetapi Yusuf merasa bingung karena measa penangkapan tersebut tidak akan berhasil tanpa menemui Jenderal Sutarto yang merupakan orang kuat setempat. Ternyata Jenderal Sutarto sepakat untuk bekerja sama, hingga akhirnya diputuslah hubungan telepon keluar Surakarta, serta menghentikan kendaraan ke dalam dan ke luar kota, dan pengawalan di tempat Sjahrir menginap juga ditarik. Adanya kerjasama dari orang tersebut, hingga terlaksanalah penculikan tersebut.

“... Pada pukul 23.15 malam Jusuf memasuki gedung itu ditemani oleh empat orang. Tanpa menghiraukan protes dari Sjahrir sendiri, ia memaksa rombongan perdana menteri itu dengan todongan senjata supaya masuk kedalam mobil-mobil yang sedang menunggu di bawah. Seluruh rombongan itu kemudian berkendara dengan cepat ke Paras, kira-kira 35 kilometer sebelah barat di lereng Gunung Merbabu. Disana para

tahanan ditempatkan dalam bungalow milik susuhunan yang kebetulan sedang kosong, dibawah penjagaan Mayor Soekarto, komandan batalyon setempat. ..." (Anderson, 1988:420).

Peristiwa penculikan Perdana Menteri Sjahrir dan beberapa menteriya mendapat reaksi yang bermacam-macam. Berbagai tokoh yang sepaham dengan pihak oposisi PP merasa senang dengan penculikan tersebut dan mengharapkan terbentuknya pemerintahan baru. Akan tetapi pihak pemerintah seperti Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta segera mengumumkan tentang keadaan darurat Bangsa Indonesia. Upaya-upaya keras pun tentang langkah-langkah yang diperlukan serta pembebasan Sjahrir segera didiskusikan. Presiden Sukarno pun berpidato mengenai pembebasan Sjahrir. "Pada waktu yang sama, pemerintah mengirimkan kawat ke Jakarta meminta suatu gencatan senjata di seluruh garis pertempuran, karena takut bahwa Belanda mungkin akan memanfaatkan krisis di Jawa Tengah itu untuk melancarkan suatu serangan" (Anderson, 1988:421). Setelah kabar tentang penculikan tersebut menyebar luas, maka Presiden Sukarno mengambil alih kekuasaan dan Kabinet Sjahrir menjadi demisioner.

Pemimpin pemerintahan segera mengadakan rapat yang dihadiri oleh Jenderal Sudirman. Rapat yang penuh dengan kemarahan juga kecurigaan bahwa Jenderal Sudirman mengetahui keberadaan Perdana Menteri Sjahrir. Rapat yang terselenggara tanggal 30 Juni 1946 tersebut menemui jalan buntu karena Jenderal Sudirman yang diminta untuk membebaskan Sjahrir menolak melakukannya. Sehingga membuat Presiden Sukarno kembali berpidato melalui radio pada petang harinya mengenai pembebasan Sjahrir dan mengancam penculikan tersebut melanggar hukum.

"Celaan Sukarno yang tegas terhadap tindakan penculikan itu, bergabung dengan kata-kata yang agak ramah untuk para pemuda yang melakukannya, ternyata memperoleh hasil yang diharapkan. Pada malam itu Sjahrir dibebaskan dan dikawal ke Jogjakarta. Dari sana ia terbang langsung kembali ke Jakarta" (Anderson, 1988:426).

5.2.2 Peristiwa 3 Juli 1946

Situasi pemerintah saat ini mulai aman dengan pembebasan Sutan Sjahrir dan keberadaannya di Jakarta telah membuat pihak pemerintah merencanakan suatu tindakan pada pihak oposisi serta tentunya pada komplotan penculik Sutan Sjahrir. Tindakan yang diambil pemerintah yaitu :

“... Pada tanggal 1 Juli malam, Polisi Negara diberikan wewenang untuk melakukan pembersihan di seluruh Yogyakarta. Buntaran, Boeddharto, Chaerul Saleh, Mohammad Saleh, Sajuti Melik, Subardjo, Ibnu Parna, Adam Malik, Pandu Katawiguna, Sumantoro, dan sejumlah tokoh-tokoh yang lebih rendah tarafnya dengan cepat ditangkapi. Hanya Iwa dan Yamin yang lolos dari jerat itu. Pagi-pagi benar pada tanggal 2 Juli, para tahanan itu dibawa ke penjara Wirogunan yang terletak di jantung kota.” (Anderson, 1988:427-428).

Sementara para pemimpin politik itu ditangkap, Sudarsono kepala resimen III, Jusuf dan Yamin yang sedang menghindari dari penangkapan tersebut langsung menghadap Panglima Besar Sudirman. Pembericaraan mengenai pertemuan tersebut, seperti yang dituliskan oleh Anderson dalam bukunya adalah “segi yang paling tak jelas dan kontroversial dari peristiwa Tiga Juli” (1988:430). Sedangkan menurut Kahin, untuk memperoleh dukungan yang netral terutama dari Panglima Besar Sudirman maka ada 2 tahap yang akan dilakukan oleh pihak oposisi pemerintah, yaitu :

“*Pertama*, Sjahrir dan kabinetnya harus disingkirkan dari kekuasaan dan digantikan oleh “Dewan Politik Tertinggi” yang terdiri atas 10 orang anggota, termasuk didalamnya Subardjo, Sukarni, dan Yamin, dan diketuai oleh Tan Malaka. Sukarno kemudian dipaksa menyerahkan kekuasaan militernya kepada Jenderal Sudirman. Tetapi ia tetap disebut sebagai kepala negara hingga pemerintahan revolusioner terbentuk. *Kedua*, Tan Malaka akan menggantikan Sukarno sebagai Presiden, lalu kekuasaan Presiden dalam bidang militer akan diambilalih oleh Jenderal Sudirman (meskipun rencana itu masih belum jelas). ...” (Kahin, 2013:267).

Sudarsono yang menganggap telah memperoleh dukungan dari Jenderal Sudirman, segeralah pergi ke Wirogunan dan menyatakan atas nama Jenderal Sudirman untuk pembebasan 14 tahanan itu. Setelah 14 tahanan tersebut

dibebaskan, Sudarsono memaksa para tahanan menuju Wiyoro tempat kediaman Suharto. Sesampainya disana Sudarsono memberikan tugas kepada Yamin dan Subardjo untuk menyiapkan konsep yang akan diserahkan kepada Presiden. Saat di Wiyoro 14 tahanan tersebut tidur dengan nyenyak, tetapi Yamin dan Subardjo telah menyelesaikan beberapa maklumat yang harus di tandatangani oleh Presiden Sukarno (lihat lampiran E).

Rombongan tersebut lalu berangkat ke Yogyakarta pada pukul 06.30 pagi tanggal 3 Juli untuk menghadap Presiden Sukarno. Saat berada di Yogyakarta terdapatlah kota yang tenang, sebelum berangkat Sudarsono yang meminta bantuan kepada Sukiman dan Laskar Rakyat pun tidak nampak sama sekali. Akan tetapi konfrontasi tetap berjalan, meskipun kemungkinan untuk menunjukkan kekuatan bersenjata telah lenyap. Setelah rombongan Sudarsono sampai di kediaman Presiden, didapatinnya anggota Pesindo bersenjata lengkap dan Polisi Militer. Maka anak buah Sudarsono dilucuti tanpa perlawanan, masuklah Sudarsono dan beberapa pemimpin politik ke ruang pertemuan. Saat di ruang pertemuan yang dilakukan Sudarsono adalah :

“... Jenderal itu mencoba membenarkan kegiatan-kegiatannya sebaik-baiknya yang dapat ia lakukan, sambil memainkan satu-satunya kartu yang masih tinggal – bahwa ia bertindak atas perintah Sudirman. Meskipun Amir, Hatta dan lain-lain sangat marah, Sukarno tetap menjaga ketenangannya, meminta dokumen-dokumen Sudarsono, dan kemudian memerintahkannya supaya pergi keluar. Ia ditahan disana dan ditempatkan sendirian dalam sebuah kamar samping selama sisa hari itu” (Anderson, 1988:438).

Pada peristiwa 3 Juli 1946 ini, mengenai keterlibatan Tan Malaka yang namanya juga tercantum dalam maklumat tersebut. Maklumat yang mengharapkan adanya Dewan Pimpinan Politik dan Kementrian Negara Baru (lihat lampiran 6). Ternyata Tan Malaka tidak berada di sana saat peristiwa itu berlangsung karena bukan sebagian dari 14 orang yang dibebaskan. Serta usulan Yusuf sebelum berangkat menemui Presiden Sukarno mengharapkan adanya Tan Malaka dan para pemimpin PP yang ditangkap pada bulan Maret. “Tetapi panggilan-panggilan telepon kepada komandan batalyon di sana tidak disahut:

maka Tan Malaka dan Sukarni tetap dalam tahanan sepanjang krisis itu” (Anderson, 1988:436). Tan Malaka pun menuliskan dalam bukunya “*Dari Penjara ke Penjara jilid III*” yaitu :

“Pemerintah yakin bahwa beberapa orang yang ditaruh namanya dalam daftar kementerian diatas, belum tahu menahu bahwa nama mereka dipakai untuk keperluan suatu komplotan meremehkan Pemerintah. Tetapi daftar itu cukup memberi gambaran, betapa luasnya komplotan mereka. Pemerintah tidak ingin menghukum orang yang tidak bersalah, tetapi jika perlu pemerintah akan meminta keterangan kepada mereka yang namanya tersebut dalam daftar Kementerian tersebut” (Tan Malaka, 2000:368).

Tan Malaka pun melanjutkan bahwa memang tidak tersangkut paut dalam penculikan Sjahrir dan Amir Syarifuddin serta tidak tahu menahu dengan peristiwa yang terjadi di istana. Penjelasan tersebut sudah dijelaskan oleh pidato pembelaan Moh. Yamin dalam Sapta Dharma yang sudah terkenal juga mendapat sambutan baik sekali dalam masyarakat kita dimasa revolusi ini. Maka disini mengenai “*Peristiwa 3 Juli 1946*” tersebut yang dikatakan sebagai suatu kudeta Tan Malaka terhadap Pemerintahan Sjahrir memang sebenarnya tidak tersangkut paut, akan tetapi para pemimpin resimen kota yang melakukan atas kesepakatan sendiri dan dengan beberapa pemimpin PP untuk menurunkan Sjahrir sebagai Perdana Menteri.

BAB 7. PENUTUP

7.1 Simpulan

Revolusi Indonesia memang merupakan suatu masa dimana setiap para elit politik bersaing untuk mewujudkan cita-cita dari ideologi atau pemikiran yang dianutnya. Kedua tokoh seperti Sutan Sjahrir dan Tan Malaka dari sekian banyak tokoh pejuang revolusi yang sangat mempengaruhi perjalanan pembentukan pemerintahan awal Indonesia serta untuk revolusi mempertahankan kemerdekaan. Sutan Sjahrir yang merupakan seorang tokoh sosialis sangat meminginkan cita-cita demokrasi. Tan Malaka pun demikian, seorang tokoh komunis yang pemikirannya dapat dikatakan melampaui jaman seperti halnya pemikirannya tentang Republik untuk bentuk negara Indonesia ini. Perbedaan ideologi membuat cara dan strategi politik pun berbeda.

konflik kedua tokoh ini dilatarbelakangi oleh dua faktor pendorong yaitu: (1) Faktor ideologi; (2) Surat Wasiat Sukarno-Hatta. Ideologi Sjahrir dan Tan Malaka sangat berbeda pandangan akan tetapi tujuannya untuk kemerdekaan Indonesia seutuhnya. Hal inilah yang membuat keduanya menjadi pilihan dalam surat wasiat Sukarno-Hatta. Sebenarnya pertemuan Sukarno dan Tan Malaka yang menjadi pencetus untuk adanya surat wasiat karena tekanan yang dirasakan oleh Sukarno-Hatta oleh penjajah. Akan tetapi Hatta yang juga ikut berperan dalam penulisan surat wasiat tersebut mengusulkan agar Sjahrir dan 2 tokoh lainnya hingga surat wasiat untuk menggantikan Sukarno-Hatta sebagai pemimpin revolusi menjadi 4 orang. Akan tetapi esensi surat wasiat tersebut tidak pernah relevan karena perubahan sistem pemerintahan yang akhirnya menjatuhkan pilihan kepada Sutan Sjahrir.

Sjahrir yang dekat dengan beberapa tokoh Belanda tersebut dan Sjahrir juga memiliki kekuasaan memimpin kabinet melakukan tindakan sesuai kehendaknya, seperti halnya pemilihan anggota kabinet juga program kabinet yang tidak disetujui oleh beberapa elit politik yaitu berunding dengan penjajah atau Belanda. Hal itu membuat Tan Malaka dan para elit politik berkumpul untuk menyatukan gagasan menjadi pihak oposisi yang kemudian disepakati bersama

bernama Persatuan Perjuangan (PP). Pemerintahan kabinet Sjahrir dengan adanya pihak oposisi yang progresif dimana salah satu pemimpinnya Tan Malaka membuat jatuh bangunnya kepemimpinan Sjahrir dalam kabinet.

Pemerintahan kabinet yang ingin melancarkan programnya, kabinet melangsungkan rapat untuk melakukan cara supaya memperlancar perundingan-perundingan selanjutnya dengan Belanda. Akhirnya, menghasilkan kesepakatan untuk menangkap para pemimpin PP seperti Tan Malaka yang kemudian ditahan oleh pihak pemerintah karena dianggap sebagai pemberontak terhadap pihak pemerintah. Penangkapan para pemimpin PP membuat pihak oposisi tersebut lemah. Hal itu mempermudah pemerintahan Sjahrir dalam melanjutkan perundingan dengan Belanda. Keadaan semacam ini hanya bertahan sementara, karena para tentara yang dekat dengan pihak oposisi berkumpul untuk membicarakan tindakan pemerintahan kabinet Sjahrir tersebut. Hingga akhirnya Mayor Yusuf meminta kepada Jenderal Sudarsono untuk menandatangani surat penangkapan terhadap Perdana Menteri Sjahrir karena dianggap mengkhianati kemerdekaan Indonesia. Para pemimpin tersebut menganggap bahwa, jika Sjahrir disingkirkan maka kepemimpinan kabinet diambil alih oleh Sukarno dan akan berubah pula kebijakan pemerintah serta mengganti susunan kabinet.

Peristiwa penculikan Sjahrir ini bukan menjadi akhir peristiwa pemberontakan terhadap pemerintahan Indonesia yang dilakukan oleh pihak oposisi. Ada pula peristiwa 3 Juli yang dilakukan oleh Jenderal Sudarsono kepada pemerintahan atau Presiden Sukarno. Jenderal Sudarsono dan kawan-kawan membuat Maklumat yang disebut "Maklumat 3 Juli", berisi tentang pembubaran Kabinet Sjahrir dan diganti oleh Kabinet koalisi serta adanya Dewan Pimpinan Politik. Pihak pemerintah kembali menuduh Tan Malaka juga terlibat dalam peristiwa tersebut, karena nama Tan Malaka juga ada dalam maklumat tersebut. Padahal Tan Malaka masih berada dipenjara dan baru mendengar kejadian tersebut pada saat Tan Malaka akan dilepaskan dari penjara. Sementara itu Sjahrir kembali mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri.

Peristiwa-Peristiwa yang terjadi akibat konflik antara Sutan Sjahrir dan Tan Malaka ini membawa dampak terhadap jatuh bangunnya pemerintahan

parleментар Indonesia serta partai-partai ataupun organisasi yang ada. Dampak terhadap pemerintah sendiri pada akhirnya terciptanya kabinet koalisi maupun Sjahrir kembali ditunjuk sebagai Perdana Menteri, akan tetapi Sjahrir tidak bisa menentukan sendiri anggota kabinetnya. Terbentuknya kabinet Sjahrir III ini pada akhirnya kembali membuat Sjahrir mengundurkan karena adanya ultimatum dari Belanda dan akhirnya Amir menjadi Perdana Menteri setelah didukung oleh 3 partai besar.

Sementara Persatuan Perjuangan sebagai pihak oposisi memang telah melemah secara gerakan akibat penangkapan para tokoh pemimpinnya. Akan tetapi PP dan Minimum Program mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan kemerdekaan 100% masih tetap ada. Sedangkan Tan Malaka yang memang tidak terbukti dengan adanya tuduhan-tuduhan akibat peristiwa-peristiwa yang terjadi akhirnya dikeluarkan dari penjara dan kembali mendirikan partai.

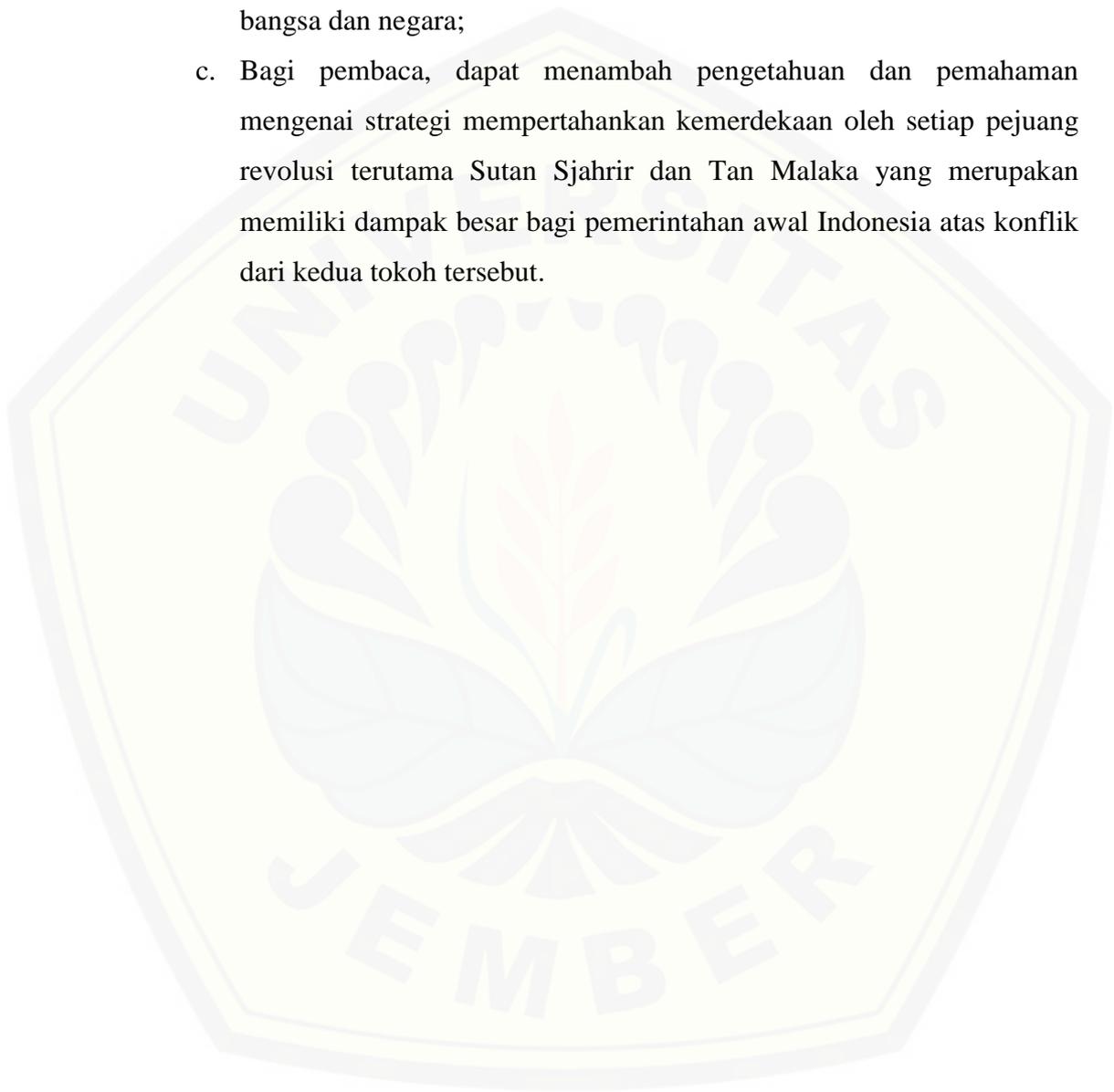
Beberapa peristiwa yang terjadi seperti penangkapan beberapa elit politik pemimpin PP termasuk Tan Malaka, penculikan Sutan Sjahrir serta peristiwa “3 Juli” atau kudeta terhadap pemerintah yang dianggap dilakukan oleh Tan Malaka. Konflik yang terjadi tersebut tidak hanya menjadikan suatu konflik yang berkepanjangan dalam masa awal pemerintahan Indonesia, tetapi pada akhirnya menciptakan persatuan untuk pemerintahan yang lebih baik hingga kemerdekaan Indonesia diakui sepenuhnya oleh bangsa barat.

7.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, penulis dapat menyampaikan beberapa saran. Adapun saran-sarannya sebagai berikut:

- a. Kepada para mahasiswa calon guru sejarah, kita harus benar-benar menghormati dan menghargai jasa-jasa para pahlawan serta dapat menerapkan nilai-nilai luhur yang pernah diperjuangkan oleh para pejuang revolusi seperti halnya Sutan Sjahrir dan Tan Malaka yang berjuang untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia yang sebenarnya.

- b. Kepada almamater, hendaknya berkenan memberikan peluang bagi mahasiswa untuk mengadakan penelitian yang sesuai dengan keinginannya, terutama yang berada di wilayah sendiri dari pada negara lain, yang akan membawa dampak terhadap rasa cinta tanah air, bangsa dan negara;
- c. Bagi pembaca, dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai strategi mempertahankan kemerdekaan oleh setiap pejuang revolusi terutama Sutan Sjahrir dan Tan Malaka yang merupakan memiliki dampak besar bagi pemerintahan awal Indonesia atas konflik dari kedua tokoh tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, B. 1988. *Revoloesi Pemoeda: Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan
- Anwar, H.R. 1966. *Perdjalanen Terachir Pahlawan Nasional Sutan Sajhrir*. Djakarta : PT Pembangunan
- Budiardjo, M. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Budyawan, S.A. 2008. *Oposisi Revolusioner: Pemikiran Tan Malaka dan Gerakan Persatuan Perjuangan di masa Revolusi Indonesia 1945-1946*. Skripsi. Yogyakarta : Universitas Sanata Dharma
- Daradjadi. 2014. *MR. SARTONO Pejuang Demokrasi & Bapak Parlemen Indonesia*. Jakarta : PT Kompas Media Nusantara
- Duverger, M. 1996. *Sosiologi Politik*. Penerjemah : Daniel Dhakidae. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Haryanto. 1991. *Elit, Massa, dan Konflik Suatu Bahasan Awal*. Yogyakarta : Pusat Antar Universitas-Studi Sosial Universitas Gadjah Mada
- Hilmi, M. 2009. *Penculikan Perdana Menteri Sjahrir di Surakarta Tahun 1946*. Skripsi. Surakarta : Universitas Sebelas Maret
- Jamil, R. N. 2018. *Soekarno dan Revolusi Indonesia*. Jember : Pustaka Abadi
- Kahin, G.M. 2013. *Nasionalisme dan Revolusi Indonesia*. Depok : Komunitas Bambu
- Kartodirdjo, S. 1992. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Gottschalk, L. 1985. *Mengerti Sejarah*. Penerjemah: Nugroho Notokusanto. Jakarta : Universitas Indonesia
- Hidayat, N. 2016. *Pemikiran Sutan Sjahrir tentang Demokrasi Indonesia Tahun 1926-1962*. Tidak diterbitkan. Skripsi. Jember : Universitas Jember

- Mas'ood, M. dan Andrews, M.C. 1978. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Mrazek, R. 1996. *Sjahrir: Politik dan Masa Pembuangan di Indonesia*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Ni'mah, R.K. 2018. *Pemikiran Tan Malaka tentang Revolusi Indonesia Tahun 1945-1949*. Tidak diterbitkan. Skripsi. Jember : Universitas Jember
- Poeze. H. A. 2008. *Tan Malaka, Gerakan Kiri, dan Revolusi Indonesia. Jilid I: Agustus 1945-Maret 1946*. Terjemahan oleh Hersri Setiawan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia; KITLV-Jakarta
- Pradinata, A. 2014. *Perjuangan Tan Malaka dan Pengaruhnya Terhadap Kebijakan Diplomasi Indonesia Belanda 1945-1949 (Sumbangan Materi Pembelajaran Sejarah Kelas XI IPA SMA Negeri 1 Pagaralam)*. Skripsi. Inderalaya : Universitas Sriwijaya
- Pranoto, S. W. 2010. *Teori dan Metodologi Sejarah*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Pruitt, D.G. dan Rubin, J.Z. 2011. *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta : Pustaka Belajar
- Ricklefs, M. C. 2008. *Sejarah Indonesia Modern Tahun 1200-2008*. Jakarta : PT. Ikrar Mandiri abadi
- Santoso, L. 2104. *Sutan Sjahrir: Pemikir dan Kiprah Sang Pejuang Bangsa*. Yogyakarta: Palapa.
- Soekanto, S. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Subardjo, A. 1978. *Kesadaran Nasional: Sebuah Otobiografi*. Jakarta: PT Gunung Agung
- Sundari, M.A. 2013. *Perjuangan Diplomasi Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945-1950*. Tidak diterbitkan. Skripsi. Jember : Universitas Jember
- Sjahrir, S. 1982. *Sosialisme Indonesia Pembangunan Kumpulan Tulisan Sutan Sjahrir*. Jakarta: Lembaga Penunjang Pembangunan Nasional (LEPPENAS).

Sjahrir, S. 1990. *Renungan dan Perjuangan*. Jakarta: Djamban dan Dian Rakyat.

Malaka, T. 2000. *Dari Penjara ke Penjara jilid III*. Reproduksi dengan penyesuaian ejaan. Jakarta : teplok press

Malaka, T. 1964. *Gerpolek, Gerilja-Politik-Ekonomi*. Bogor : Pustaka polaris

Malaka, T. 2015. *Catatan-Catatan Perjuangan (1946-1948)*. Bandung : Segarsy

Malaka, T. 2014. *Muslihat, Politik, & Rencana Ekonomi Berjuang*. Yogyakarta : Narasi

Zulkifli, A. 2010. *Tan Malaka Bapak Republik Yang Dilupakan*. Jakarta : PT Gramedia

Universitas Jember. 2011. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember : Jember University Press

Varma, SP. 2010. *Teori Politik Modern*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

LAMPIRAN

Lampiran A.

METRIKS PENELITIAN

Topik	Judul Penelitian	Jenis dan Sifat Penelitian	Permasalahan	Sumber Data	Metode Penelitian
Sejarah Nasional Indonesia	Konflik Politik Sutan Sjahrir-Tan Malaka Tahun 1945-1947	a. Jenis Penelitian: Penelitian Sejarah b. Sifat Penelitian: Penelitian Pustaka	1) Bagaimana latar belakang terjadinya konflik antara Sutan Sjahrir-Tan Malaka tahun 1945-1947? 2) Bagaimana situasi politik pemerintahan Sutan Sjahrir menghadapi Tan Malaka sebagai barisan oposisi pada tahun 1945-1947? 3) Bagaimana dampak konflik politik antara Sutan Sjahrir-Tan Malaka terhadap kondisi pemerintahan Indonesia?	Sumber Tertulis: Buku	a. Metode Penelitian, dengan langkah: - Pemilihan topik - Heuristik - Kritik - Interpretasi - Historiografi b. Pendekatan sosiologi politik c. Teori konflik

Lampiran B.**Surat Wasiat Sukarno-Hatta^{*)}****Amanat Kami**

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu, ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

Setelah kami menjatakan kemerdekaan Indonesia, atas dasar kemauan rakyat Indonesia sendiri pada tanggal 17 Agustus 1945 bersandar pada undang2 Dasar yang sesuai dengan hasrat rakyat untuk mendirikan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur. Maka negara Indonesia menghadapi bermacam-macam kesulitan dan rintangan, yang hanya bisa diselesaikan oleh rakyat yang bersatu-padu serta gagah berani di bawah pimpinan yang tjerdik, pandai, tjakap dan tegap.

Sedangkan sedjarah dunia membuktikan pula, bahwa pelaksanaan tjita2 kemerdekaan itu bergantung pada kesanggupan seluruh rakyat untuk memberi korban apapun djua, seperti sudah dibuktikan oleh negara2 atau bangsa2 yang besar di Amerika –Utara dan Selatan, di Eropa-Barat, di Rusia, Mesir, Turki, dan Tiongkok.

Sjahkan, datanglah saatnya buat menentukan keterangan siapa akan ditaruhkan obor kemerdekaan, seandainya kami tiada berdaja lagi akan meneruskan perjuangan kita ditengah-tengah rakyat sendiri.

Perjuangan rakyat kita seterusnya menetapkan kemerdekaannya hendaklah tetap di atas persatuan segala golongan rakyat dengan mendjunjung tinggi Republik Indonesia, seperti yang tertjantum pokok2nya Undang2 Dasar Kita.

Bahwasanya setelah kami pikirkan dengan seksama dan periksa dengan teliti pula dengan persetudjuan penuh dengan para pemimpin yang ikut serta bertanggung djawab.

Maka kami putuskanlah, bahwa pimpinan perjuangan kemerdekaan kita diteruskan oleh sdr2:

Tan Malaka, Iwa Kusumasumantri, Sjahrir, Wongsonegoro.

Hidup Republik Indonesia!

Hidup Bangsa Indonesia!

Merdeka!

Djakarta, 1 Oktober 1945

Kami,
Soekarno, Moh. Hatta

^{*)} Poeze. H. A. 2008. *Tan Malaka, Gerakan Kiri, dan Revolusi Indonesia. Jilid I: Agustus 1945-Maret 1946*. Terjemahan oleh Hersri Setiawan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia; KITLV-Jakarta. Hal 61.

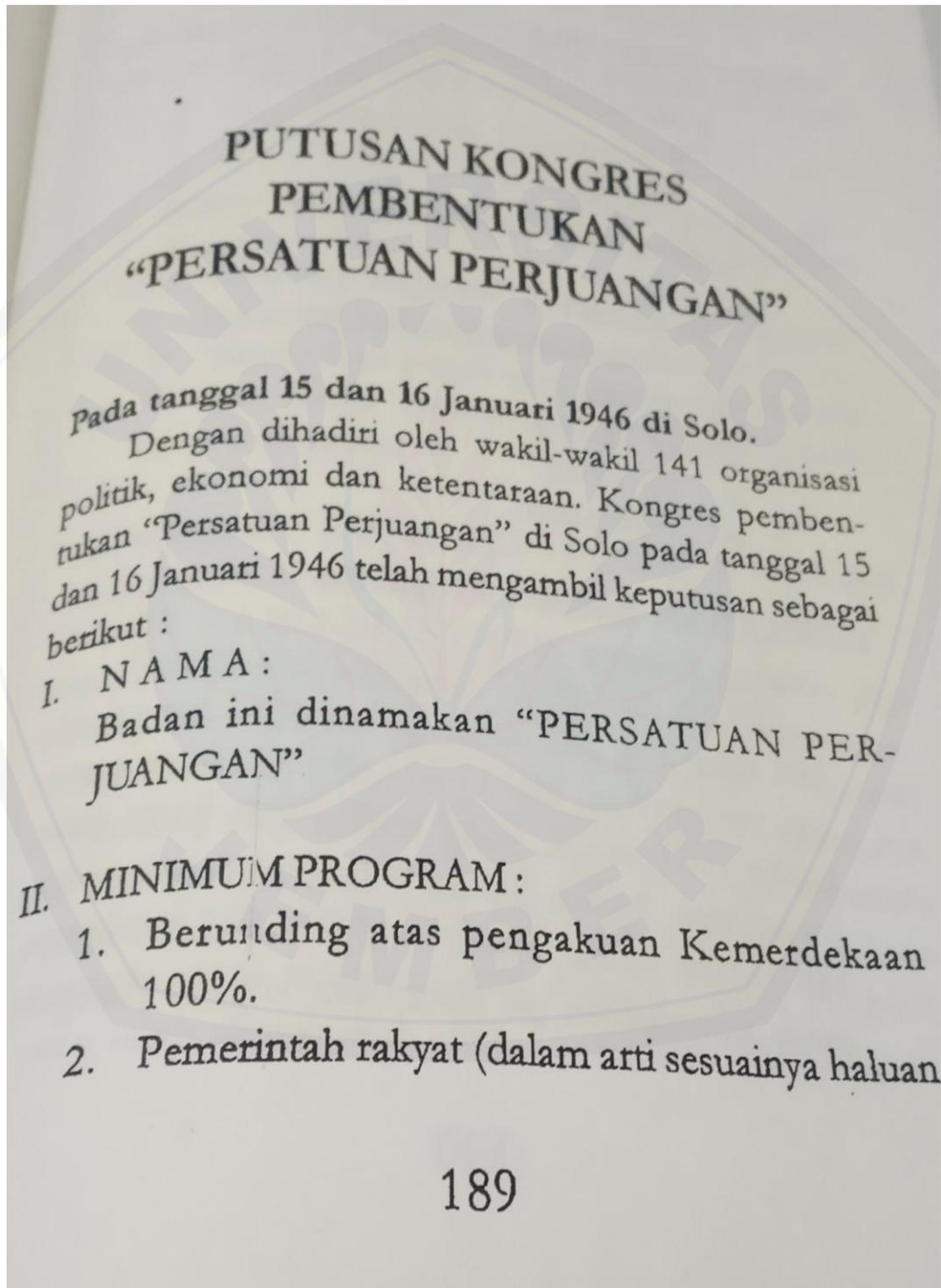
Lampiran C.**Susunan Kabinet Sjahrir I^{*)}**

- 1). Perdana Menteri : Sutan Sjahrir
- 2). Menteri Dalam Negeri : Sutan Sjahrir
- 3). Menteri Luar Negeri : Sutan Sjahrir
- 4). Menteri Penerangan : Amir Sjarifuddin
- 5). Menteri Keamanan Rakyat : Amir Sjarifuddin
- 6). Menteri Keuangan : Sunario Kolopaking
- 7). Menteri Pendidikan : T.G.S Moelia
- 8). Menteri Kehakiman : Suwandi
- 9). Menteri Sosial : Adjidarmo
- 10). Menteri Kesehatan : Darmasetiawan
- 11). Menteri Perekonomian : Darmawan Mangunkusumo
- 12). Menteri Tenaga Kerja : Putuhena
- 13). Menteri Pekerjaan Umum : Putuhena
- 14). Menteri Perhubungan : Rasad

^{*)} Santoso, L. 2104. *Sutan Sjahrir: Pemikir dan Kiprah Sang Pejuang Bangsa*. Yogyakarta: Palapa.

Lampiran D.

PUTUSAN KONGRES PERSATUAN PERJUANGAN*)



TAN MALAKA

3. Tentara rakyat (dalam arti sesuainya haluan tentara dengan kemauan rakyat).
4. Melucuti Tentara Jepang.
5. Mengurus tawanan bangsa Eropa.
6. Menyita (membeslag), confiscate dan menyelenggarakan pertanian musuh (Kebun).
7. Menyita (membeslag) dan menyelenggarakan perindustrian musuh (pabrik, bengkel, tambang dll).

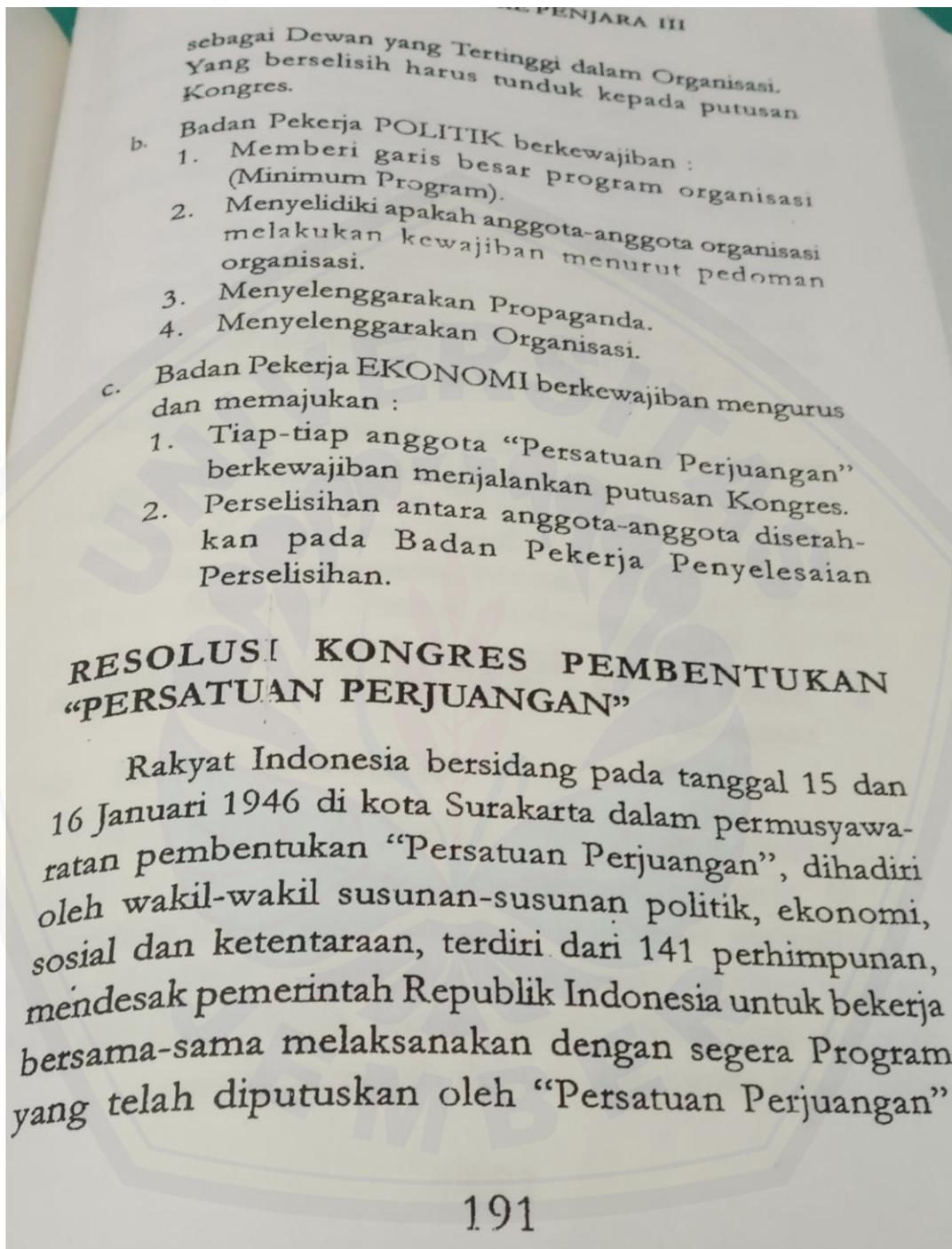
III. ORGANISASI ;

Organisasi terdiri atas 3 bagian :

1. Kongres
2. Sekretariat :
 - a. Penyelesaian Perselisihan.
 - b. Politik
3. Badan Pekerja :
 - c. Ekonomi
 - d. Pertahanan.

KEWAJIBAN BADAN PEKERJA :

- a. Badan Pekerja **MENYELESAIKAN PERSELISIHAN** diwajibkan mengurus perselisihan antara kita sama kita. Jika Badan ini tak dapat menyelesaikan perselisihan, maka pertikaian itu dimajukan ke muka Sekretariat, yang terdiri atas pemimpin-pemimpin Badan-badan Pekerja tersebut. Jika sekretariat tidak dapat menyelesaikan soalnya, maka perselisihan itu dimajukan kepada Kongres,



yang berbunyi sebagai berikut :

1. Berunding atas pengakuan Kemerdekaan 100%
2. Pemerintah rakyat (dalam arti sesuainya haluan pemerintah dengan kemauan rakyat).
3. Tentara rakyat (dalam arti sesuainya haluan tentara dengan kemauan rakyat).
4. Melucuti Tentara Jepang.
5. Mengurus tawanan bangsa Eropa.
6. Menyita dan menyelenggarakan Pertanian Musuh (kebun).
7. Menyita dan menyelenggarakan Perindustrian Musuh (pabrik, bengkel, tambang dan lain-lain).

PANITIA "PERSATUAN PERJUANGAN"

Sebagai anggota Panitia "Persatuan Perjuangan"

1. Perindustrian
 2. Pertanian
 3. Pasar
 4. Koperasi
- d. Badan pekerja PERTAHANAN berkewajiban mengurus :
1. Tentara
 2. Polisi
 3. Pemuda
 4. Latihan (jasmani dan rohani)

Latihan jasmani artinya : latihan militer, latihan rohani artinya : memberi pelajaran politik, hingga anggota-anggotanya mempunyai pendidikan politik yang teguh yang tidak mudah digoncangkan.

ANGGOTA

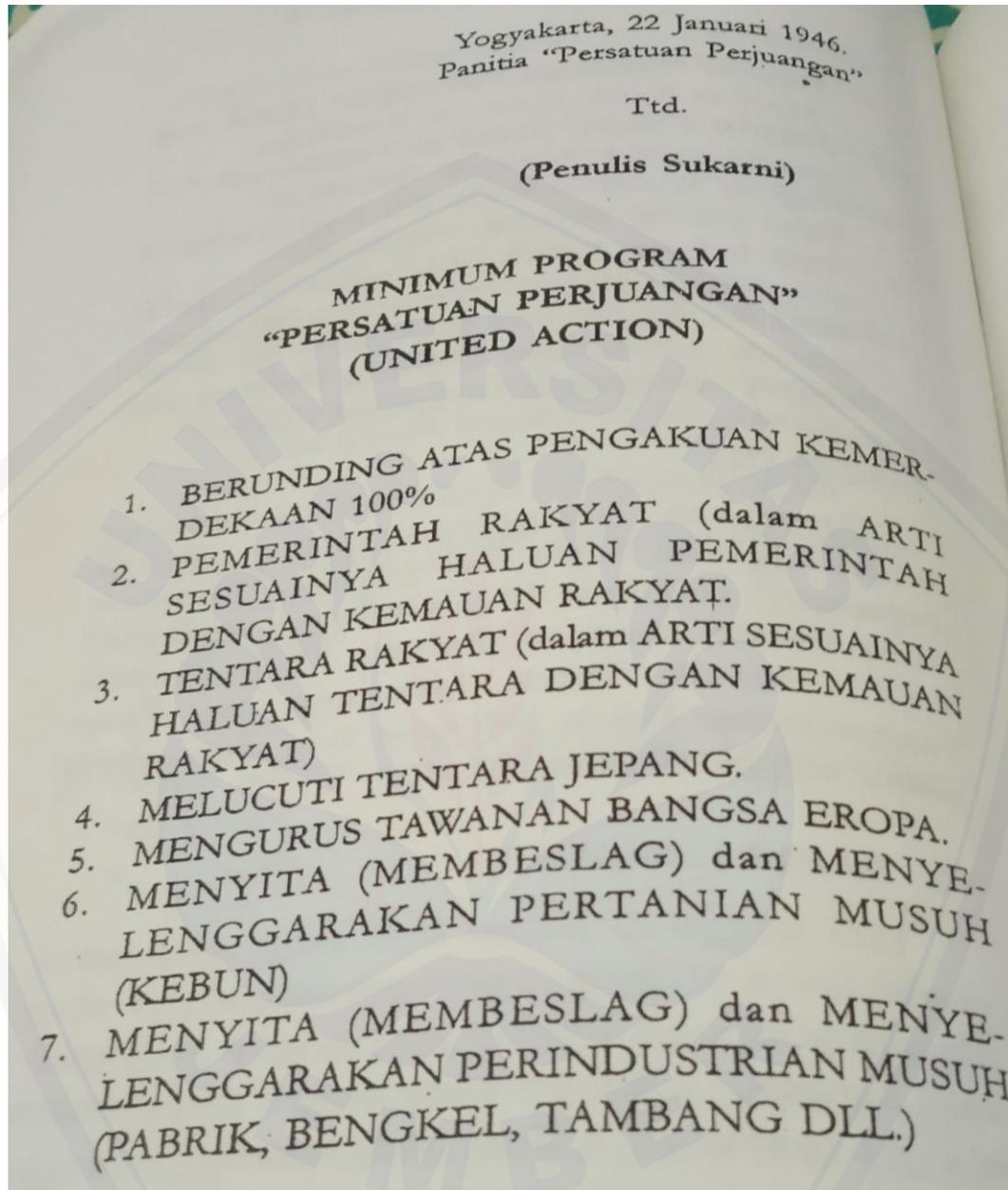
1. Anggota "Persatuan Perjuangan" terdiri atas Organisasi Politik, Sosial dan Ketentaraan.
2. Anggota Kongres terdiri atas wakil-wakil dari anggota-anggota "Persatuan Perjuangan".
3. Anggota Sekretariat terdiri atas anggota-anggota Badan Pekerja "Persatuan Perjuangan".
4. Anggota Badan Pekerja ialah mereka yang dipilih oleh anggota-anggota "Persatuan Perjuangan" ditambah dengan para ahli (dalam hal teknik, ekonomi administrasi dsb) yang disetujui oleh kongres buat menjalankan putusan Kongres.

DISCIPLINE

Ditetapkan anggota-anggota Panitia Penyelenggaraan Rapat Pembentukan "Persatuan Perjuangan" yang lama ditambah dengan wakil-wakil Partai Sosialis, Masyumi, Pesindo, P.R.D., Perwari, P.K.I., Pemuda Puteri Indonesia dan Pusat Pemberontakan Rakyat Indonesia yang akan bekerja sampai tanggal 27 Januari 1946.

VI. RAPAT LENGKAP

Pada tanggal 27 Januari 1946 untuk melanjutkan pembicaraan tentang organisasi seluruhnya akan dilaksanakan rapat lengkap yang dihadiri oleh wakil-wakil organisasi masing-masing dengan mengirimkan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang utusan.



*) Malaka, T. 2000. *Dari Penjara ke Penjara jilid III*. Reproduksi dengan penyesuaian ejaan. Jakarta : teplok press

Lampiran E.**SUSUNAN KABINET SJAHRIR II^{*)}**

- 1) Perdana Menteri : Sjahrir
- 2) Menteri Luar Negeri : Sjahrir
- 3) Menteri Dalam Negeri : Soedarsono
- 4) Menteri Kesehatan : Darmasetiawan
- 5) Menteri Keuangan : Surachman Tjokroadisurjo
- 6) Menteri Perdagangan dan Industri : Darmawan Mangunkusumo
- 7) Menteri Pertanian dan Persediaan : Rasad
- 8) Menteri Pertahanan : Amir Sjarifuddin
- 9) Menteri Kehakiman : Suwandi
- 10) Menteri Pengajaran : Moh. Syafei
- 11) Menteri Penerangan : Mohammad Natsir
- 12) Menteri Sosial : Maria Ulfah Santoso
- 13) Menteri Agama : Moh. Rasjidi
- 14) Menteri Perhubungan : Abdul Karim

^{*)} Kahin, G.M. 2013. *Nasionalisme dan Revolusi Indonesia*. Depok : Komunitas Bambu

Lampiran F.**Maklumat 3 Juli^{*)}**

“Maklumat No. 2 :

Atas desakan Rakjat dan Tentara dalam tingkatan kedua revolusi Indonesia, jang berdjuang untuk membela seluruh Ra'jat dan seluruh kepulauan dibawah kedaulatan Negara Republik Indonesia atas Kemerdekaan seratus prosen, maka kami Presiden Republik Indonesia pada hari ini memberhentikan seluruh Kementerian Negara Sutan Sjahrir dan Amir Sjarifuddin.

Jogjakarta, 3 Djuli 1946.

President Republik Indonesia.”

“Maklumat No. 3 :

Atas desakan Rakjat dan Tentara dalam tingkatan kedua Revolusi Indonesia jang berdjoang untuk membela Rakjat dan seluruh kepulauan Indonesia dibawah lingkungan kedaulatan Negara Republik Indonesia atas kemerdekaan seratus prosen dan berhubung dengan seluruh rakjat dan seluruh kepulauan dalam bahaja perang maka kami Presiden Republik Indonesia menjerahkan kekuasaan rakjat yang ditangan kami jang berkenaan dengan pembelaan dan pengawasan Negara kepada Panglima Besar Angkatan Darat, Laut dan Udara bersama2 dengan markasnja, dan jang berkenaan dengan pimpinan politik, social dan ekonomi kepada Dewan Pimpinan Politik. Anggota Dewan Pimpinan Politik dan kementerian jang baru dengan segera akan diumumkan.

Jogjakarta, 3 Djuli 1946.

President Republik Indonesia.”

“Maklumat No. 4 :

Untuk memenuhi maklumat kami no. 3 tanggal 3 Djuli 1946 maka kami, President Republik Indonesia, mengangkat bersama ini sepuluh orang anggota Dewan Pimpinan Politik : Saudara2

- | | |
|---------------------------|------------------|
| 1. Buntaran Martoatmodjo | 6. Mohamad Yamin |
| 2. Budhiarto Martoatmodjo | 7. Subardjo |
| 3. Chairul Saleh | 8. Sunarjo |
| 4. Gatot | 9. Tan Malaka |
| 5. Iwa Kusuma Sumantri | 10. Wahid Hasjim |

Jakarta, 3 Djuli 1946

President Republik Indonesia.”

“Maklumat No. 5 :

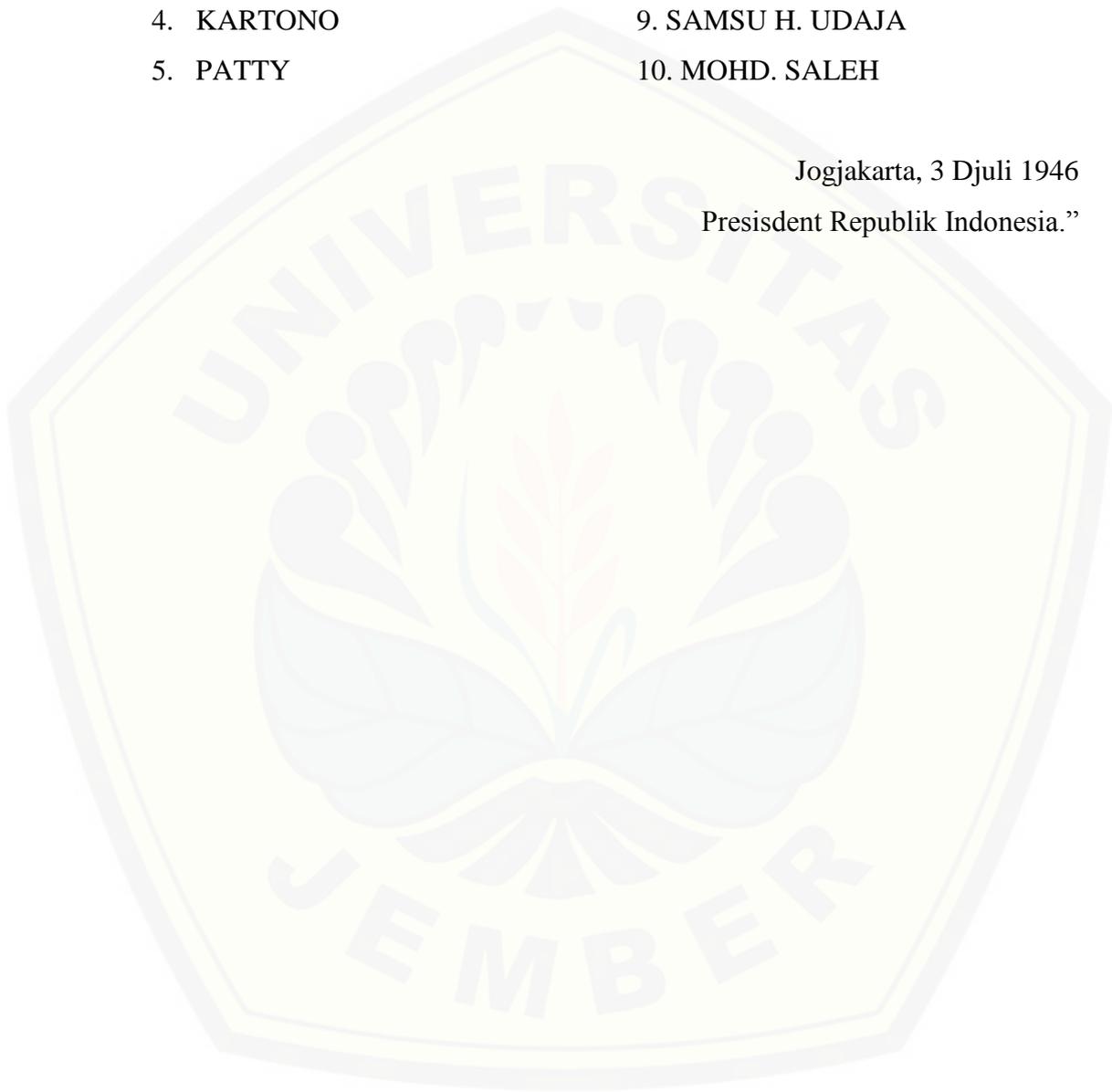
Untuk memenuhi maklumat kami No. 2 dan 3 tanggal 3 Djuli 1946 maka kami Presiden Republik Indonesia mengangkat bersama ini anggota2 Kementerian Negara :

Menteri Dalam Negeri	BUDHYARTO
Menteri Luar Negeri	SUBARDJO
Menteri Pertahanan	akan disiarkan
Menteri Kehakiman	SUPOMO
Menteri Kemakmuran	TAN MALAKA
Menteri Agama	WAHID HASJIM
Menteri Sosial	IWA KUSUMA SUMANTRI
Menteri Bangunan Umum	ABIKUSNO TJOKROSUJOSO
Menteri Keuangan	A.A. MARAMIS
Menteri Kesehatan	BUNTARAN MARTOATMODJO
Menteri Penerangan dan Penjiaran . .	MOHAMAD YAMIN
Menteri Pengadjaran	KI HADJAR DEWANTORO
Menteri Perhubungan	RUSENO

Menteri Negara :

- | | |
|------------------|-------------------|
| 1. CHAIRUL SALEH | 6. SUKIMAN |
| 2. FATURRACHMAN | 7. SUNARJO |
| 3. GATOT | 8. SARTONO |
| 4. KARTONO | 9. SAMSU H. UDAJA |
| 5. PATTY | 10. MOHD. SALEH |

Jogjakarta, 3 Djuli 1946
President Republik Indonesia.”



^{*)}Anderson. B. 1988. Revoloesi Pemoeda: Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan

Lampiran G.**KABINET SUTAN SJAHRIR III^{*)}**

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| 1). Perdana Menteri | : Sjahrir |
| 2). Menteri Luar Negeri | : Sjahrir |
| 3). Menteri Dalam Negeri | : Mohammad Roem |
| 4). Menteri Kesehatan | : Darmasetiawan |
| 5). Menteri Keuangan | : Sjafruddin Prawiranegara |
| 6). Menteri Perdagangan dan Industri | : Darmawan Mangunkusumo |
| 7). Menteri Pertanian dan Persediaan | : Rasad |
| 8). Menteri Pertahanan | : Amir Sjarifuddin |
| 9). Menteri Kehakiman | : Mr. Susanto Tirtoprodjo |
| 10). Menteri Pengajaran | : Ir. Gunarso |
| 11). Menteri Penerangan | : Muhammad Natsir |
| 12). Menteri Sosial | : Maria Ulfah Santoso |
| 13). Menteri Agama | : Faturrachman |
| 14). Menteri Perhubungan | : Ir. Djuanda |
| 15). Menteri Pekerjaan Umum | : Putuhena |
| 16). Menteri Negara | : Sri Sultan Hamengku Buwono IX |

^{*)} Kahin, G.M. 2013. *Nasionalisme dan Revolusi Indonesia*. Depok : Komunitas Bambu